PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO

wonosobo
the soul of java

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO

TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 900/ 0971 /2024
NOMOR : 170/ 7 /2024

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**
   Jabatan : Bupati Wonosobo
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo

2. a. Nama : **EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H**
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
      Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
   b. Nama : **AMIR HUSEIN**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
      Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
   c. Nama : **SUMARDIYO, SE**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
      Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
   d. Nama : **AGUS RIYADI**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
      Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo

   Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Wonosobo, 25 Juli 2024

BUPATI WONOSOBO
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA

EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H
KETUA DPRD

AMIR HUSEIN
WAKIL KETUA

SUMARDIYO, SE
WAKIL KETUA

AGUS RIYADI
WAKIL KETUA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah selanjutnya dilaksanakan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dalam siklus tahunan, integrasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai ketentuan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD dan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). RKA SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan rancangan APBD. Dengan demikian rencana pembangunan daerah tahunan diwujudkan dalam PPAS yang diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi pelaksana urusan pemerintahan, program, kegiatan maupun sub kegiatan beserta plafon anggarannya yang disusun sesuai Kebijakan Umum Anggaran dan RKPD tahun berkenaan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025. Prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah beserta perangkat daerah yang akan melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 untuk masing-masing urusan pemerintahan baik menurut perangkat daerah maupun prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo maupun oleh masyarakat diperlukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025:

a. Menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dengan pengelolaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.
b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui jalinan komunikasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Wonosobo.
c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun 2025 dan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID 19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11);

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan daerah mencakup keseluruhan penerimaan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai dengan kewenangan pengelolaan penerimaan daerah masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran daerah yang direncanakan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penerimaan daerah yang ditargetkan merupakan rencana penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana penerimaan daerah digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah yang direncanakan pada tahun berkenaan. Rencana penerimaan daerah tahun 2025 berisikan target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025. Rencana penerimaan daerah tahun 2025 sejumlah Rp2.061.085.153.849,00 yang terdiri dari beberapa komponen penerimaan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

   Rencana Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 berjumlah Rp351.002.425.748,00 terdiri dari:

   a. Pajak Daerah sejumlah Rp138.085.000.000,00;
   b. Retribusi Daerah sejumlah Rp182.410.847.582,00;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp25.852.678.166,00;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp4.653.900.000,00.

2. Pendapatan Transfer

   Rencana pendapatan transfer tahun 2025 berjumlah Rp1.682.521.504.000,00 terdiri dari:

   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp1.567.609.286.000,00;
   b. Pendapatan Transfer Antar–Daerah sejumlah Rp114.912.218.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana lain-lain pendapatan daerah yang sah berjumlah Rp16.866.000.000,00 berupa pendapatan hibah.

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 hanya dari prediksi Sisa Lebih Perhitungan Angggaran (SiLPA) tahun 2024 sejumlah Rp10.695.224.101,00.

Rencana penerimaan daerah yang meliputi rencana pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang akan digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah yang meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 adalah sebagaimana dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**351.002.425.748**	
4.1.01	Pajak Daerah	138.085.000.000	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	182.410.847.582	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.852.678.166	
4.1.04	Lain PAD Yang Sah	4.653.900.000	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	**1.682.521.504.000**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.567.609.286.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.912.218.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**16.866.000.000**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.866.000.000	
4.3.02	Dana Darurat	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.050.389.929.748**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**10.695.224.101**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.695.224.101	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	

6.1.04	Penerimaan Pinjaman	0	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**10.695.224.101**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**2.061.085.153.849**	

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah, serta dimaksudkan untuk terjadinya keselarasan dalam keseluruhan aspek pengelolaan keuangan daerah dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggunjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, obyek, rincian, dan sub rincian obyek belanja daerah. Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas belanja daerah tahun 2025 mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 merupakan tahun keempat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 memiliki tema pembangunan: **Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah** guna pencapaian Visi **Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera.**

Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 meliputi:

1. **Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas** melalui
    a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dengab prioritas pada penguatan infrastruktur jalan yang tahan bencana untuk mempercepat pengembagan sektor pariwisata dan pertanian;
    b. Peningkatan layanan akses air limbah domestik layak, yaitu melalui

perluasan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengeolaan air limbah domestik dengan prinsip kolaborasi;

c. Peningkatan layanan akses air minum aman di pedesaan dengan prioritas pada peningkatan cakupan palayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum dengan prinsip kolaborasi;
d. Peningkatan kinerja layanan irigasi dengan fokus pada peningkatan pengelolaan layanan irigasi;
e. Peningkatan keselamatan lalu lintas yang berprioritas pada peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi;
f. Penanganan kawasan permukiman layak huni, yaitu pada pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif dan berkelanjutan;
g. Peningkatan instrumen penataan ruang dengan prioritas pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal melalui :

a. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dengan prioritas pada pengembangan sentra produksi pangan (SPP):
b. Menjaga pasokan komoditas bahan pokok penting dan komoditas bersubsidi melalui pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok penting dan barang subsidi;
c. Peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, dengan prioritas pada peningkatan produksi dan produktivitas industri pengolahan hasil pertanian;
d. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dengan fokus pada perbaikan tata niaga perdagangan dan optimalisasi pemanfaat pasa (pasar induk, pasar sapuran, pasar pagi) serta menjaga stabilitas rantai pasok bahan pokok;
e. Pengembangan destinasi dan potensi sektor pariwisata, dengan prioritas pada Pengembangan potensi wisata prioritas, Peningkatan daya tarik wisata, sarana prasarana dan promosi wisata, Pengembangan desa wisata, Pengembangan geopark dieng serta Peningkatan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya;
f. Peningkatan pertumbuhan investasi dengan fokus pada Perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha dan Pengembangan investasi pada sektor pertanian dan pariwisata daerah;
g. Peningkatan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan lembaga ekonomi desa yang

berprioritas pada peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/Koperasi, peningkatan kapasitas UMKM/Koperasi, Perluasan kemitraan UMKM/Koperasi;

h. Pengembangan kapasitas dan potensi BUMDES, dengan fokus pada Pendampingan usaha BUMDES dan Pengembangan potensi BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa;
i. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif dengan prioritas pada Pendampingan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi rumah tangga miskin, Peningkatan akses permodalan, pengelolaan usaha bagi rumah tangga miskin dan Peningkatan produktivitas petani rumah tangga miskin/buruh tani;
j. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berfokus pada Perluasan lapangan kerja dan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

3. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing** melalui

a. Peningkatan kualitas pendidikan dengan prioritas pada Peningkatan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan dan Peningkatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah dijangkau;
b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas pada Penigkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan dan Penigkatan kualutas keluarga melalui perluasan cakupan layanan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat;
c. Penigkatan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial yang berprioritas pada Penurunan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, Penguatan sistem layanan dan pendataan PPKS untuk ketepatan sasaran dan intervensi program, Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan, Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, Peningkatan pemenuhan hak anak dan Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dengan berprioritas pada Peningkatan kecakapan pemuda dibidang pariwisata, pertanian dan pendukungnya dan Peningkatan prestasi olahraga.

4. **Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah** melalui :
    a. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan prioritas pada Pengoptimalan pengelolaan keuangan aset daerah, Pengoptimalan pemanfataan sumber - sumber pendapatan yang sah, Peningkatan kualitas kerja perencanaan, Peningkatan kualitasi manajemen pemerintahan, Pengoptimalan peran legislatif dalam penyusunan kebijakan dan Penigkatan kualitas pengawasan;
    b. Perwujudan pemerintahan yang kapabel dengan fokus pada Peningkatan manajemen pengelolaan SDM dan kinerja aparatur, Peningkatan tata kelola informasi, Peningkatan pengelolaan arsip untuk manjamin akuntabilitas dan kualitas pelayana publik;
    c. Penguatan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik dengan berprioritas pada Peningkatan layanan informasi publik yang inklusif, Peningkatan pelayanan publik dengan prioritas pada Percepatan pencapaian SPM, Pengembangan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat dan Peningkatan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik.
    d. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan fokus pada Peningkatan keamanan dari bencana, kebakaran dan kekerasan, Peningkatan stabilitas keamanan masyarakat.
    e. Peningkatan pemenuhan hak - hak politik dengan prioritas pada peningkatan partisipasi politik masyarakat sesuai prinsip demokrasi.
    f. Peningkatan toleransi kehidupan bermasyarakat tata kelola informasi dengan fokus pada Peningkatan semangat toleransi terhadap keberagaman.
5. **Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana** melalui:
    a. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan prioritas pada konservasi lahan berbasis ekonomi dan Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
    b. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan fokus pada Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
    c. Peningkatan kinerja layanan persampahan dengan berprioritas pada Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan dan Reformasi pengelolaan sampah sistematik hulu hilir terintegrasi;

d. Perluasan wilayah yang berketahanan bencana dengan fokus pada Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 memuat :

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing perangkat daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025.

Adapun sinergitas program dimaksud dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 3.1. SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	**Transformasi Ekonomi**				
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	a. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Persentase obyek diduga cagar budaya yang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	a. Persentase obyek budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Persentase obyek budaya yang terinventarisir	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	a. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase kelompok tani ikan yang aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase UPR aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	a. Persentase koperasi yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase koperasi produksi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar on line	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	a. Persentase usaha mikro yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Pertumbuhan Jumlah usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			d. Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan omset koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan jumlah usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa berstatus rawan pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	a. Rasio desa berlumbung pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase desa mandiri pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN	a. Ketersediaan pangan per kapita/ hari	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase cadangan pangan utama (beras)		
		PROGRAM PEMASARAN	a. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan Jumlah kemitraan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Pertumbuhan event wisata tingkat nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI	a. Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Pertumbuhan Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN	a. Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Indeks kelembagaan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA	a. Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase jumlah desa wisata berbasis	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	a. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Persentase pelayanan komitmen perizinan di		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	a. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Pertumbuhan nilai investasi di bidang		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	a. Pertumbuhan jumlah kemitraan/ kerjasama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Jumlah komoditas eksport	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	a. Presentase Toko Modern yang memasarkan ProdukLokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase market place lokal yang memasarkan produk lokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Pertumbuhan omzet market place lokal produk UMKM	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA	a. Persentase pasar dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase kios/los yang dimanfaatkan		
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rasio metrologi legal yang ditera ulang	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database Industri Kecil Menengah (IKM)	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	a. Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			c. Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			d. Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			e. Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			f. Pertumbuhan Jumlah sentra industri	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			g. Persentase klaster kategori berkembang	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	a. Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase JUT yang berada di sentra produksi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase jalan produksi yag berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Persentase tempat pemotongan hewan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	a. Jumlah produksi tanaman pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Jumlah produksi tanaman hortikultura sayur-	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Jumlah produksi Bunga	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Jumlah produksi tanaman biofarmaka	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			e. Jumlah produksi tanaman perkebunan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			f. Jumlah Populasi ternak	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			g. Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			h. Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			i. Jumlah produksi tanaman hortikultura buah-	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			j. Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYULUHAN	a. Persentase kelompok tani aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase gapoktan aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase petani ruta misin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang berizin	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	a. Persentase perselisihan kerja yang	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	a. Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			c. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			d. Persentase jumlah wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	a. Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase bangunan gedung pelayanan publik Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	a. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BAB)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	a. Persentase Panjang Jalan Kabupaten kondisi	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase panjang jalan kabupaten yang		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN	a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	a. Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			c. Persentase Terminal Tipe C Kondisi Baik dan berfungsi optimal	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			d. Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			e. Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			f. Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			g. Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			h. Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			i. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			j. Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			k. V/C Rasio pada jalan kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	a. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	a. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			c. Persentase rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN	Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi (50%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	a. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
2	**Transformasi Sosial**				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	a. Persentase atlet berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Persentase Cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			d. Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN	a. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase pemuda berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase wirausaha muda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGENDALIAN	a. Persentase satuan pendidikan non formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	a. Rasio posyandu per satuan balita	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase posyandu dengan strata mandiri	Dinas Kesehatan	
			c. Persentase poskestren aktif	Dinas Kesehatan	
			d. Persentase keselarasan program daerah dengan RKPD	Dinas Kesehatan	
			e. Cakupan desa siaga aktif strata mandiri	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	a. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM	Dinas Kesehatan	
			c. Ratio bed rawat inap per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	
			d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin OpeRasional	Dinas Kesehatan	
			e. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	
			f. Indeks kepuasan pelanggan labkesda	Dinas Kesehatan	
			g. Rata- rata capaian SPM puskesmas	Dinas Kesehatan	
			h. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			i. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			j. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			k. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			l. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			m. Cakupan penduduk yang memiliki jaminan	Dinas Kesehatan	
			n. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	
			o. Persentase desa ODF	Dinas Kesehatan	
			p. Persentase sarana air minum yang sesuai	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			q. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			r. Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS	RSUD Setjonegoro	
			s. Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	RSUD Setjonegoro	
			t. Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Dinas Kesehatan	
			u. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	
			v. Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Dinas Kesehatan	
			w. Prevalensi Gizi Buruk pada anak balita	Dinas Kesehatan	
			x. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
			y. Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			z. Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			aa. Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			ab. Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			ac. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			ad. Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			ae. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			af. Persentase merokok penduduk usia < 18	Dinas Kesehatan	
			ag. Angka kesakitan penyakit menular	Dinas Kesehatan	
			ah. Angka kesakitan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	
			ai. Persentase faskes dasar dan rujukan yang terintegrasi dengan layanan PSC 119	Dinas Kesehatan	
			aj. Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online	Dinas Kesehatan	
			ak. Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	a. Persentase Puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase Aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan BLUD
			b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Dinas Kesehatan	
			c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	RSUD Setjonegoro	
			d. Persentase keselarasan program daerah dengan RKPD	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	a. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
			c. Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa ramah anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Persentase perempuan sebagai tenaga professional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Persentase anggaran responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Persentase APBDes responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			f. Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	a. Cakupan layanan konseling	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan Lembaga Layanan tingkat desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	a. Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	a. Rasio kecukupun guru kelas SD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Rasio ketercukupan Guru SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGELOLAAN	a. APK PAUD 3-6 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			d. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			e. Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			f. Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			g. Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			h. Persentase sekolah ramah anak	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			i. Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			j. Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			k. PAUD (TK/RA/KB/SPS yang terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			l. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			m. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			n. Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			o. Persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			p. Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			q. Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	a. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir Assesment Nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase sekolah jenjang pendidkan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			f. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			g. Rata-rata usia kawin pertama wanita	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			h. Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			i. Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Drop out KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Kepersertaan KB Pria	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Rata-rata Jumlah anak per keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	a. Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan.atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PEMBINAAN	a. Persentase perpustakaan terakreditasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase koleksi digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			d. Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			e. Persentase penambahan koleksi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			f. Persentase peningkatan kunjungan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	a. Persentase Arsip Digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase Arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan (NSPK)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	a. Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Rasio penerima program usaha produktif laki-laki : perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kelengkapan Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	a. Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase KPM PKH graduasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	a. Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			e. Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3	**Transformasi Tata Kelola**				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	
			b. Persentase tindak lanjut hasil review APIP	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	a. Persentase perangkat daerah yang memiliki profil manajemen risiko	Inspektorat	
			b. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat	
			c. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Inspektorat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat	Kecamatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	
			b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan	Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	Badan Kepegawaian Daerah	
			b. Persentase penurunan kasus pelanggaran	Badan Kepegawaian Daerah	
			c. Persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan pemetaan kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	
			d. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	
			e. Persentase ASN berkinerja baik	Badan Kepegawaian Daerah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN	a. Persentase penurunan konflik SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			b. Persentase penyelesaian kasus / kejadian potensi konflik SARA yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase kasus / kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan Jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG	a. Persentase barang milik daerah dalam kondisi	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase tanah aset pemda yang		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program APBD terhadap RKPD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase silpa terhadap APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			c. Persentase penyerapan belanja transfer	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			d. Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase kenaikan PAD		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	a. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			c. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			d. Persentase progres tahapan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e. Persentase capaian kinerja program bidang ekonomi terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			f. Persentase capaian kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			g. Persentase capaian kinerja program bidang Infrastruktur dan kewilayahan terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase capaian kinerja program terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			c. Persentase tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			d. Persentase kesesuaian program RKPD dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e. Persentase keterisian data capaian indikator	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM RISET DAN INOVASI	a. Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase inovasi yang diterapkan		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	a. Persentase ketercapaian SPM Pelayanan	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Sekretariat Daerah	
			c. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	
			d. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan	Sekretariat Daerah	
			e. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Sekretariat Daerah	
			c. Level kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa)	Sekretariat Daerah	
			d. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang	Sekretariat Daerah	
			e. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM DUKUNGAN	a. Persentase Peraturan Daerah inisiatif DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
			b. Persentase hasil rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			c. Persentase kegiatan DPRD yang	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Rasio kepemilikan akta kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			c. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/ perangkat daerah yang memanfaatkan data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Persentase cakupan updating data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	a. Persentase pengelolaan arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			d. Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			e. Persentase arsip digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			d. Persentase Desa dan Kelurahan tangguh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	a. Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			b. Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja	
			b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	
			c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan	Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	a. Nilai Kebijakan Internal SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			b. Nilai Tata Kelola SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			c. Nilai Managemen SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN	a. Nilai Aksesibilitas Website	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			b. Nilai Informasi Tersedia Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			c. Nilai Kelembagaan PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Semua Perangkat Daerah	
			b. Persentase pemenuhan sarpras pendukung	Semua Perangkat Daerah	
			c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Perangkat Daerah	
			d. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			e. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase BUMDes berkembang dan maju	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase BUMDes berbadan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase desa berkinerja baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d.Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	a. Persentase PKK aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase Posyandu aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENATAAN DESA	a. Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	a. Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	**Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia**				
5	**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**				

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	a. Persentase ketaatan Pengampu usaha dan.atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persaentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN	a. Persentase Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase Penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN	a. Persentase luas lahan kritis diluar kawasan	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas	Dinas Lingkungan Hidup	
			c. Persentase mata air yang rusak dan.atau menurun debitnya	Dinas Lingkungan Hidup	
			d. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Dinas Lingkungan Hidup	
			e. Persentase Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendampingan dan penyuluhan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	a.Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase ketersediaan dokumen KLHS	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	a. Persentase tersedianya fasilitas TPS 3R skala kelurahan/desa	Dinas Lingkungan Hidup	

TABEL 3.2. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	**Peningkatan Kapasitas Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Sektor Unggulan Didukung Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas**				
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	a. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Persentase obyek diduga cagar budaya yang terdata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	a. Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Persentase obyek budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase obyek budaya yang terinventarisir	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	a. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase kelompok tani ikan yang aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase UPR aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Pertumbuhan jumlah produksi benih ikan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	a. Persentase koperasi yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase koperasi produksi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar on line	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	a. Persentase usaha mikro yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Pertumbuhan Jumlah usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			d. Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			e. Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/UB	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan omset koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	a. Persentase unit usaha mikro naik kelas	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Pertumbuhan omset usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa berstatus rawan pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio desa berlumbung pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			Persentase desa mandiri pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	a. Ketersediaan pangan per kapita/ hari	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase cadangan pangan utama (beras)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	a. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan Jumlah kemitraan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Pertumbuhan event wisata tingkat nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	a. Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Pertumbuhan Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	a. Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Indeks kelembagaan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	a. Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			b. Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			c. Persentase jumlah desa wisata berbasis agroindustri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	a. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	a. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	a. Pertumbuhan jumlah kemitraan/ kerjasama investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			b. Pertumbuhan jumlah kemitraan investasi di bidang pertanian dan pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Jumlah komoditas eksport	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	a. Presentase Toko Modern yang memasarkan ProdukLokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			b. Persentase market place lokal yang memasarkan produk lokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			c. Pertumbuhan omzet market place lokal produk UMKM	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Persentase kios/los yang dimanfaatkan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rasio metrologi legal yang ditera ulang	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	a. Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			c. Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			d. Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			e. Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			f. Pertumbuhan Jumlah sentra industri	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			g. Persentase klaster kategori berkembang	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	a. Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase JUT yang berada di sentra produksi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase jalan produksi yag berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			d. Persentase tempat pemotongan hewan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Jumlah produksi tanaman pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Jumlah produksi tanaman hortikultura sayur-sayuran	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Jumlah produksi Bunga	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Jumlah produksi tanaman biofarmaka	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			e. Jumlah produksi tanaman perkebunan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			f. Jumlah Populasi ternak	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			g. Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			h. Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			i. Jumlah produksi tanaman hortikultura buah-buahan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			j. Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang tersertifikasi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	a. Persentase kelompok tani aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			b. Persentase gapoktan aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			c. Persentase petani ruta misin/buruh tani yang mengikuti sekolah lapang	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			d. Persentase petani ruta miskin/buruh tani yang menjadi anggota kelompok tani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	a. Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	a. Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			b. Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			c. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			d. Persentase jumlah wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	a. Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase bangunan gedung pelayanan publik Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	a. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BAB)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	a. Persentase Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			b. Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang		
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			c. Persentase Terminal Tipe C Kondisi Baik dan berfungsi optimal	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			d. Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			e. Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			f. Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			g. Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			h. Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			i. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			j. Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			k. V/C Rasio pada jalan kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	a. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	a. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana		
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi (25%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	a. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			b. Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang berijin	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Lebih Pintar, Sehat, Bugar, Berkarakter dan Adaptif Secara Inklusif dan Merata**				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK PAUD 3-6 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			d. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			e. Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			f. Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			g. Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			h. Persentase sekolah ramah anak	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			i. Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			j. Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			k. PAUD (TK/RA/KB/SPS yang terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			l. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			m. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			n. Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			o. Persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			p. Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			q. Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			r. Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	a. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir Assesment Nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase sekolah jenjang pendidkan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Rasio kecukupun guru kelas SD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Rasio ketercukupan Guru SMP	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	a. Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	a. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase pemuda berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase wirausaha muda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	a. Persentase atlet berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			b. Persentase Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			c. Persentase Cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			d. Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Ratio bed rawat inap per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	
			d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin OpeRasional	Dinas Kesehatan	
			e. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	
			f. Indeks kepuasan pelanggan labkesda	Dinas Kesehatan	
			g. Rata- rata capaian SPM puskesmas	Dinas Kesehatan	
			h. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			i. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			j. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			k. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			l. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			m. Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			n. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Dinas Kesehatan	
			o. Persentase desa ODF	Dinas Kesehatan	
			p. Persentase sarana air minum yang sesuai standar	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			q. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			r. Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS	RSUD Setjonegoro	
			s. Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	RSUD Setjonegoro	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a. Persentase Puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			b. Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	
			c. Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Dinas Kesehatan	
			d. Prevalensi Gizi Buruk pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
			e. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
			f. Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			g. Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			h. Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			i. Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			j. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			k. Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			l. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			m. Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	Dinas Kesehatan	
			n. Angka kesakitan penyakit menular	Dinas Kesehatan	
			o. Angka kesakitan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	
			p. Persentase faskes dasar dan rujukan yang terintegrasi dengan layanan PSC 119	Dinas Kesehatan	
			g. Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online	Dinas Kesehatan	
			r. Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
			c. Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Rasio posyandu per satuan balita	Dinas Kesehatan	
			b. Persentase posyandu dengan strata mandiri	Dinas Kesehatan	
			c. Persentase poskestren aktif	Dinas Kesehatan	
			d. Cakupan desa siaga aktif strata mandiri	Dinas Kesehatan	
			Persentase keselarasan program daerah dengan RKPD	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase Aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan BLUD
			b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Dinas Kesehatan	
			c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	RSUD Setjonegoro	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Persentase perempuan sebagai tenaga professional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Persentase anggaran responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Persentase APBDes responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			f. Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	a. Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	a. Cakupan layanan konseling	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan Lembaga Layanan tingkat desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa ramah anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Rata-rata Jumlah anak per keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 setiap tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Drop out KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			e. Kepersertaan KB Pria	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			b. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			c. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			d. Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			f. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			g. Rata-rata usia kawin pertama wanita	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			h. Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			i. Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	a. Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase KPM PKH graduasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	a. Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			e. Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	a. Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Rasio penerima program usaha produktif laki- laki : perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kelengkapan Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a. Persentase perpustakaan terakreditasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Persentase pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase koleksi digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			d. Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			e. Persentase penambahan koleksi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			f. Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	a. Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan.atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
3	**Peningkatan Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan**				
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	a. Persentase tersedianya fasilitas TPS 3R skala kelurahan/desa	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Persentase Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase Penanganan sampah		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	a.Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase ketersediaan dokumen KLHS	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas	Dinas Lingkungan Hidup	
			c. Persentase mata air yang rusak dan.atau menurun debitnya	Dinas Lingkungan Hidup	
			d. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Dinas Lingkungan Hidup	
			e. Persentase Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	a. Persentase ketaatan Pengampu usaha dan.atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	
			b. Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendampingan dan penyuluhan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
4.	**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**				
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Rasio kepemilikan akta kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			c. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/ perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			b. Persentase cakupan updating data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	`
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja	
			b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	
			d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi	Badan Kepegawaian Daerah	
			b. Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Daerah	
			c. Persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan pemetaan kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	
			d. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	
			e. Persentase ASN berkinerja baik	Badan Kepegawaian Daerah	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	a. Persentase penurunan konflik SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			b. Persentase penyelesaian kasus / kejadian potensi konflik SARA yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	a. Persentase kemanfaatan hasil kelitbangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase inovasi yang diterapkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	a. Persentase pengelolaan arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			b. Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			c. Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			d. Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			e. Persentase arsip digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			d. Persentase Desa dan Kelurahan tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			b. Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap (Response Time)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	a. Nilai Aksesibilitas Website	DInas Komunikasi dan Informatika	
			b. Nilai Informasi Tersedia Setiap Saat	DInas Komunikasi dan Informatika	
			c. Nilai Kelembagaan PPID	DInas Komunikasi dan Informatika	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	DInas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	a. Nilai Kebijakan Internal SPBE	DInas Komunikasi dan Informatika	
			b. Nilai Tata Kelola SPBE	DInas Komunikasi dan Informatika	
			c. Nilai Managemen SPBE	DInas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan Jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus / kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	Kecamatan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program APBD terhadap RKPD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase silpa terhadap APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Persentase penyerapan belanja transfer	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			d. Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	a. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			b. Persentase kenaikan PAD		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase capaian kinerja program terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			c. Persentase tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			d. Persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e. Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			b. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			c. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			d. Persentase progres tahapan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e. Persentase capaian kinerja program bidang ekonomi terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			f. Persentase capaian kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			g. Persentase capaian kinerja program bidang Infrastruktur dan kewilayahan terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a. Persentase Peraturan Daerah inisiatif DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			b. Persentase hasil rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			c. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Sekretariat Daerah	
			c. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			d. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a.Level kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa)	Sekretariat Daerah	
			b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
			c. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	DInas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	
			b. Persentase tindak lanjut hasil review APIP	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	a. Persentase perangkat daerah yang memiliki profil manajemen risiko	Inspektorat	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			b. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat	
			c. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Inspektorat	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	a. Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase BUMDes berkembang dan maju	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase BUMDes berbadan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase desa berkinerja baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d.Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	a. Persentase PKK aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase Posyandu aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			c. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			d. Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENATAAN DESA	a. Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			b. Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	
			b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan	Kecamatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Kecamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Semua Perangkat Daerah	
			b. Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Semua Perangkat Daerah	
			c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Perangkat Daerah	
			d. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	
			e. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	

TABEL 3.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1.	**Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas**					
		A. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dengan prioritas pada penguatan infrastruktur jalan yang tahan bencana untuk mempercepat pengembagan sektor pariwisata dan				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				Persentase Panjang Jalan yang ditangani	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		B. Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak, yaitu melalui perluasan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengeolaan air limbah domestik dengan prinsip				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	a. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				b. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi (tempat BAB)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		C. Peningkatan layanan akses air minum aman di pedesaan dengan prioritas pada peningkatan cakupan palayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum dengan prinsip kolaborasi				
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		D. Peningkatan kinerja layanan irigasi dengan fokus pada peningkatan pengelolaan layanan irigasi				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
		E. Peningkatan keselamatan lalu lintas yang berprioritas pada peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	a. Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				b. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				c. Persentase Terminal Tipe C Kondisi Baik dan berfungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				d. Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				e. Persentase parkir tepi jalan umum yang tertata	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				f. Persentase tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				g. Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				h. Persentase sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				i. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				j. Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				k. V/C Rasio pada jalan kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		F. Penanganan kawasan permukiman layak huni, yaitu pada pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif dan berkelanjutan				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	a. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				b. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				c. Persentase rumah tanggan yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	a. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				b. Persentase satuan permukiman yang memiliki jalan lingkungan dan drainase kondisi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	a. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Persentase Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh yang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengembang perumahan kualifikasi kecil yang bersertifikasi (25%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
		G. Peningkatan instrumen penataan ruang dengan prioritas pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan sejenisnya				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				b. Persentase Penetapan Kebijakan Perencanaan Tata	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	a. Persentase bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG)	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
				b. Persentase bangunan gedung pelayanan publik Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase aset lahan strategis yang ditata sesuai rencana teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	
2	**Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal**					
		A. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dengan prioritas pada pengembangan sentra produksi pangan (SPP):				
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Produksi tanaman pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				b. Produksi tanaman hortikultura sayur	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				c. Produksi Bunga	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				d. Produksi tanaman biofarmaka	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				e. Produksi tanaman perkebunan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				f. Populasi ternak	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				g. Populasi ternak domba Wonosobo sebagai sumber daya genetik lokal Wonosobo	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				h. Persentase kelompok tani yang menggunakan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				i. Produksi tanaman hortikultura buah	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				j. Persentase komoditas pertanian dan peternakan yang	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	a. Persentase LP2B yang mengalami alih fungsi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				b. Persentase JUT yang berada di sentra produksi	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				c. Persentase jalan produksi yag berada di sentra/kawasan perkebunan dan hortikultura	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				d. Persentase tempat pemotongan hewan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/zoonosis yang ditangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kejadian atau kasus dari organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tertangani	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENYULUHAN	Persentase kelompok tani aktif	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	a. Ketersediaan pangan per kapita/ hari	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				b. Persentase cadangan pangan utama (beras)		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa berstatus rawan pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN	Rasio desa berlumbung pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Persentase desa mandiri pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
		B. Menjaga pasokan komoditas bahan pokok penting dan komoditas bersubsidi melalui pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok penting dan barang				
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase disparitas harga kepokmas antar wilayah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		C. Peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan, dengan prioritas pada peningkatan produksi dan produktivitas industri pengolahan hasil pertanian				
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	a. Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				b. Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				c. Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				d. Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				e. Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				f. Pertumbuhan Jumlah sentra industri	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				g. Persentase klaster kategori berkembang	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database Industri Kecil	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
		D. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dengan fokus pada perbaikan tata niaga perdagangan dan optimalisasi pemanfaat pasar (pasar induk, pasar sapuran, pasar pagi) serta menjaga stabilitas rantai pasok bahan pokok				
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	a. Persentase pasar dalam kondisi baik	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				b. Persentase kios/los yang dimanfaatkan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Jumlah komoditas eksport	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM	Presentase Toko Modern yang memasarkan ProdukLokal	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rasio metrologi legal yang ditera ulang	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		E. Pengembangan destinasi dan potensi sektor pariwisata, dengan prioritas pada Pengembangan potensi wisata prioritas, Peningkatan daya tarik wisata, sarana prasarana dan promosi wisata, Pengembangan desa wisata, Pengembangan geopark dieng serta Peningkatan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya				
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	a. Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Pertumbuhan destinasi wisata minat khusus	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	a. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				b. Pertumbuhan Jumlah kemitraan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				c. Pertumbuhan event wisata tingkat nasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	a. Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				b. Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				c. Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	a. Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				b. Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				c. Pertumbuhan Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	a. Persentase obyek budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				b. Persentase obyek budaya yang terinventarisir	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	a. Persentase cagar budaya yang ditetapkan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				b. Persentase obyek diduga cagar budaya yang terdata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		F. Peningkatan pertumbuhan investasi dengan fokus pada Perbaikan iklim investasi dan kepastian usaha dan Pengembangan investasi pada sektor pertanian dan pariwisata				
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	a. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pertanian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				b. Pertumbuhan nilai investasi di bidang pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan jumlah kemitraan/ kerjasama investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	a. Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang dikelola PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				b. Persentase pelayanan komitmen perizinan di satu pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data/informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		G. Peningkatan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan lembaga ekonomi desa yang berprioritas pada peningkatan produksi dan produktivitas UMKM/Koperasi, peningkatan kapasitas UMKM/Koperasi, Perluasan kemitraan UMKM/Koperasi				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	a. Persentase usaha mikro yang bisa mengakses pembiayaan perbankan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				b. Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	a. Pertumbuhan jumlah usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	a. Persentase koperasi yang bisa mengakses pembiayaan	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				b. Persentase koperasi produksi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				c. Persentase koperasi produksi yang mengembangkan akses pasar on line	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP koperasi sehat	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan omset koperasi	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		H. Pengembangan kapasitas dan potensi BUMDES, dengan fokus pada Pendampingan usaha BUMDES dan Pengembangan potensi BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa				
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Persentase BUMDes berkembang dan maju	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase BUMDes berbadan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		I. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif dengan prioritas pada Pendampingan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi rumah tangga miskin, Peningkatan akses permodalan, pengelolaan usaha bagi rumah tangga miskin dan Peningkatan produktivitas petani rumah tangga miskin/buruh tani				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase rumah tangga miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/ UB	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		J. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berfokus pada Perluasan lapangan kerja dan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja				
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	a. Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
				b. Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
3	**Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing**					
		A. Peningkatan kualitas pendidikan dengan prioritas pada Peningkatan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan dan Peningkatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah dijangkau				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK PAUD 3-6 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				c. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				d. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				e. Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				f. Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				g. Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				h. Persentase sekolah ramah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				i. Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				j. Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				k. PAUD (TK/RA/KB/SPS yang terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				l. Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				m. Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				n. Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				o. Persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				p. Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				q. Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				r. Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	a. Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir Assesment Nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Persentase sekolah jenjang pendidkan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				c. Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. Rasio kecukupun guru kelas SD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				b. Rasio ketercukupan Guru	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	a. Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				b. Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	a. Persentase perpustakaan terakreditasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				b. Persentase pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat kegiatan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				c. Persentase koleksi digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				d. Persentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				e. Persentase penambahan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				f. Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	a. Cakupan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				b. Cakupan naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				c. Cakupan koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan.atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		B. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas pada Peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan dan Peningkatan kualitas keluarga melalui perluasan cakupan layanan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama dan Paripurna	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM	Dinas Kesehatan	
				c. Ratio bed rawat inap per satuan penduduk	Dinas Kesehatan	
				d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin OpeRasional	Dinas Kesehatan	
				e. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	
				f. Indeks kepuasan pelanggan labkesda	Dinas Kesehatan	
				g. Rata- rata capaian SPM puskesmas	Dinas Kesehatan	
				h. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				i. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				j. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				k. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				l. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	Dinas Kesehatan	
				m. Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	
				n. Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Dinas Kesehatan	
				o. Persentase desa ODF	Dinas Kesehatan	
				p. Persentase sarana air minum yang sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				q. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				r. Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS	RSUD Setjonegoro	
				s. Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	RSUD Setjonegoro	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a. Persentase Puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				b. Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Dinas Kesehatan	
				b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI	Dinas Kesehatan	
				c. Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Dinas Kesehatan	
				d. Prevalensi Gizi Buruk pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
				e. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	Dinas Kesehatan	
				f. Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				g. Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				h. Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				i. Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				j. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				k. Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				l. Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				m. Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				n. Angka kesakitan penyakit menular	Dinas Kesehatan	
				o. Angka kesakitan penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan	
				p. Persentase faskes dasar dan rujukan yang terintegrasi dengan layanan PSC 119	Dinas Kesehatan	
				g. Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran	Dinas Kesehatan	
				r. Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Dinas Kesehatan	
				b. Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	
				c. Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Rasio posyandu per satuan balita	Dinas Kesehatan	
				b. Persentase posyandu dengan strata mandiri	Dinas Kesehatan	
				c. Persentase poskestren aktif	Dinas Kesehatan	
				d. Cakupan desa siaga aktif strata mandiri	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Rata-rata Indeks kepuasan layanan puskesmas	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan BLUD
				b. Lama Tunggu Pelayanan Obat Racikan	Dinas Kesehatan	
				c. Lama Tunggu Pelayanan Rawat Jalan.	RSUD Setjonegoro	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Rata-rata Jumlah anak per keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100 setiap tahun		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	a. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				c. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				d. Drop out KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				e. Kepersertaan KB Pria	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	a. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				c. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				d. Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				f. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				g. Rata-rata usia kawin pertama wanita	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				h. Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				i. Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		C. Peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial yang berprioritas pada Penurunan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, Penguatan sistem layanan dan pendataan PPKS untuk ketepatan sasaran dan intervensi program, Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan, Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, Peningkatan pemenuhan hak anak dan Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak				

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	a. Persentase PPKS yang terlayani jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase desa yang melakukan verifikasi dan validasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				c. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				d. Persentase KPM PKH graduasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	a. Persentase kelompok usaha produktif yang mandiri	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Rasio penerima program usaha produktif laki- laki :	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				c. Persentase rata- rata kenaikan PPKS yang memiliki kemandirian ekonomi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	a. Persentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				c. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				d. Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				e. Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kelengkapan Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	a. Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa ramah anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	a. Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Persentase perempuan sebagai tenaga professional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				c. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				d. Persentase anggaran responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				e. Persentase APBDes responsif gender	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				f. Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	a. Cakupan layanan konseling	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				b. Cakupan Lembaga Layanan tingkat desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	a. Persentase kawasan perdesaan yang dilegalisasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			PROGRAM PENATAAN DESA	a. Persentase desa yang telah menyelesaikan penegasan batas desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase fasilitas umum skala desa dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	a. Persentase PKK aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				b. Persentase Posyandu aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				c. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				d. Persentase serapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha produktif desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		D. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dengan berprioritas pada Peningkatan kecakapan pemuda dibidang pariwisata, pertanian dan pendukungnya dan Peningkatan prestasi olahraga				
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Persentase pemuda berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Persentase wirausaha muda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	a. Persentase atlet berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				b. Persentase Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				c. Persentase Cakupan pembinaan atlet oleh organisasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				d. Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
4	**Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah**					
		A. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan prioritas pada Pengoptimalan pengelolaan keuangan aset daerah, Pengoptimalan pemanfataan sumber - sumber pendapatan yang sah, Peningkatan kualitas kerja perencanaan, Peningkatan kualitasi manajemen pemerintahan, Pengoptimalan peran legislatif dalam penyusunan kebijakan dan Peningkatan kualitas pengawasan				
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program APBD terhadap RKPD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
				b. Persentase silpa terhadap APBD	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
				c. Persentase penyerapan belanja transfer	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
				d. Persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	a. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
				b. Persentase kenaikan PAD		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				b. Persentase capaian kinerja program terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				c. Persentase tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				d. Persentase kesesuaian program RKPD dan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				e. Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				b. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				c. Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				d. Persentase progres tahapan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				e. Persentase capaian kinerja program bidang ekonomi terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				f. Persentase capaian kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				g. Persentase capaian kinerja program bidang Infrastruktur dan kewilayahan terhadap target kinerja RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan	Sekretariat Daerah	
				b. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	Sekretariat Daerah	
				b. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Sekretariat Daerah	
				c. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	
				d. Persentase rekomendasi hasil KOORDINASI Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Sekretariat Daerah	
				e. Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	
				f. Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	a. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sekretariat Daerah	
				b. Persentase rekomendasi hasil KOORDINASI Bagian Pengendalian Pembangunan	Sekretariat Daerah	
				c. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Semua Perangkat Daerah	
				b. Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Semua Perangkat Daerah	
				c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Semua Perangkat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				d. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat	Semua Perangkat Daerah	
				e. Persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat waktu	Semua Perangkat Daerah	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a. Persentase Peraturan Daerah inisiatif DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
				b. Persentase hasil rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
				c. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat	
				b. Persentase tindak lanjut hasil review APIP	Inspektorat	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	a. Persentase perangkat daerah yang memiliki profil manajemen risiko	Inspektorat	
				b. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat	
				c. Persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Inspektorat	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Kecamatan	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Kecamatan	
		B. Perwujudan pemerintahan yang kapabel dengan fokus pada Peningkatan manajemen pengelolaan SDM dan kinerja aparatur, Peningkatan tata kelola informasi, Peningkatan pengelolaan arsip untuk manjamin akuntabilitas dan kualitas pelayana publik				
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	a. Persentase layanan kepegawaian yang berbasis	Badan Kepegawaian Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN	Badan Kepegawaian Daerah	
				c. Persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan pemetaan kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	
				d. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	
				e. Persentase ASN berkinerja	Badan Kepegawaian Daerah	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	a. Persentase pengelolaan arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				b. Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				c. Persentase desa dengan pengelolaan arsip kategori baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				d. Persentase arsip vital konvensional yang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
				e. Persentase arsip digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		C. Penguatan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik dengan berprioritas pada Peningkatan layanan informasi publik yang inklusif				
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	a. Nilai Aksesibilitas Website	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				b. Nilai Informasi Tersedia Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				c. Nilai Kelembagaan PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	a. Nilai Kebijakan Internal SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				b. Nilai Tata Kelola SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				c. Nilai Managemen SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		D. Peningkatan pelayanan publik dengan prioritas pada Percepatan pencapaian SPM, Pengembangan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat dan Peningkatan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik.				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan	
				b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan	Kecamatan	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	a. Persentase peningkatan Jumlah lembaga/ perangkat daerah yang memanfaatkan data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				b. Persentase cakupan updating data kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				c. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	`
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	a. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				b. Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	a. Rasio kepemilikan akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				b. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				c. Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil penelitian pengembangan yang dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		E. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan fokus pada Peningkatan keamanan dari bencana, kebakaran dan kekerasan, Peningkatan stabilitas keamanan masyarakat				
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja	
				b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	
				d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat	Kecamatan	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
				b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				d. Persentase Desa dan Kelurahan tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				b. Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap (Response	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		F. Peningkatan pemenuhan hak - hak politik dengan prioritas pada peningkatan partisipasi politik masyarakat sesuai prinsip demokrasi				
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan Jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		G. Peningkatan toleransi kehidupan bermasyarakat tata kelola informasi dengan fokus pada Peningkatan semangat toleransi terhadap keberagaman				
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan cakupan masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	a. Persentase penurunan konflik SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				b. Persentase penyelesaian kasus / kejadian potensi konflik SARA yang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus / kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5.	**Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana**					

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
		A. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan prioritas pada konservasi lahan berbasis ekonomi dan Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan				
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	a.Persentase penyelesaian dokumen RPPLH sampai dengan dinyatakan sah atau legal	Dinas Lingkungan Hidup	
				b. Persentase ketersediaan dokumen KLHS	Dinas Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a. Persentase luas lahan kritis diluar kawasan hutan	Dinas Lingkungan Hidup	
				b. Rata-rata koefisien rezim aliran daerah aliran sungai prioritas	Dinas Lingkungan Hidup	
				c. Persentase mata air yang rusak dan.atau menurun debitnya	Dinas Lingkungan Hidup	
				d. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Dinas Lingkungan Hidup	
				e. Persentase Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		B. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan fokus pada Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim				
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	a. Persentase ketaatan Pengampu usaha dan.atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup	
				b. Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		C. Peningkatan kinerja layanan persampahan dengan berprioritas pada Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan dan Reformasi pengelolaan sampah sistematik hulu hilir terintegrasi				
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah	Dinas Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendampingan dan penyuluhan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2		3	4	5	6
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	a. Persentase TPS 3R dan/atau sejenisnya skala kelurahan/desa	Dinas Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Persentase Pengurangan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
				b. Persentase Penanganan		
		D. Perluasan wilayah yang berketahanan bencana dengan fokus pada Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana				
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

BAB IV
PLAFON ANGGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS tahun 2025 antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota mencakup urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung, unsur penunjang, dan unsur kewilayahan.

Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sejumlah Rp1.199.296.782.940,00. Terdiri dari
   1.1. Bidang Pendidikan : Rp652.683.135.065,00
      1.1.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga : Rp652.683.135.065,00
   1.2. Bidang Kesehatan : Rp391.496.852.888,00
      1.2.1. Dinas Kesehatan dan Puskesmas : Rp204.024.160.416,00
      1.2.2. RSUD KRT. Setjonegoro : Rp187.472.692.472,00
   1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Rp112.033.989.548,00
      1.3.1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Rp112.033.989.548,00
   1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Rp13.242.694.483,00
      1.4.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan : Rp13.242.694.483,00
   1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat : Rp16.519.251.163,00
      1.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja : Rp8.839.835.408,00
      1.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Rp7.679.415.755,00
   1.6. Bidang Sosial : Rp13.320.859.793,00
      1.6.1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Rp13.320.859.793,00
2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sejumlah Rp125.240.361.229,00. Terdiri dari
   2.7. Bidang Tenaga Kerja : Rp8.685.928.035,00
      2.7.1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi : Rp8.685.928.035,00
   2.8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Rp1.461.920.000,00
      2.8.1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Rp1.461.920.000,00
   2.9. Bidang Pangan : Rp24.299.755.502,00
      2.9.1. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan : Rp24.299.755.502,00

2.10. Bidang Pertanahan : Rp233.206.492,00
    2.10.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan : Rp233.206.492,00
2.11. Bidang Lingkungan Hidup : Rp18.577.934.425,00
    2.11.1. Dinas Lingkungan Hidup : Rp18.577.934.425,00
2.12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Rp8.075.936.587,00
    2.12.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Rp8.075.936.587,00
2.13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Rp7.459.310.000,00
    2.13.1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Rp7.459.310.000,00
2.14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Rp18.631.971.583,00
    2.14.1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Rp18.631.971.583,00
2.15. Bidang Perhubungan : Rp5.939.719.028,00
    2.15.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan : Rp5.939.719.028,00
2.16. Bidang Komunikasi dan Informatika : Rp10.290.985.223,00
    2.16.1. Dinas Komunikasi dan Informatika : Rp10.290.985.223,00
2.17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah : Rp1.871.101.680,00
    2.17.1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : Rp1.871.101.680,00
2.18. Bidang Penanaman Modal : Rp5.914.319.029,00
    2.18.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Rp5.914.319.029,00
2.19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga : Rp4.525.000.000,00
    2.19.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga : Rp4.525.000.000,00
2.20. Bidang Statistik : Rp86.400.000,00
    2.20.1. Dinas Komunikasi dan Informatika : Rp86.400.000,00
2.21. Bidang Persandian : Rp59.000.000,00
    2.21.1. Dinas Komunikasi dan Informatika : Rp59.000.000,00
2.22. Bidang Kebudayaan : Rp2.045.000.000,00
    2.22.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : Rp2.045.000.000,00
2.23. Bidang Perpustakaan : Rp869.683.218,00
    2.23.1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah : Rp869.683.218,00

2.24. Bidang Kearsipan : Rp6.213.190.427,00

2.24.1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah : Rp6.213.190.427,00

3. Urusan Pemerintahan Pilihan sejumlah Rp70.408.935.401,00. Terdiri dari

3.25. Bidang Kelautan dan Perikanan : Rp830.000.000,00

3.25.1. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan : Rp830.000.000,00

3.26. Bidang Pariwisata : Rp16.563.561.848,00

3.26.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : Rp16.563.561.848,00

3.27. Bidang Pertanian : Rp32.814.623.400,00

3.27.1. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan : Rp32.814.623.400,00

3.30. Bidang Perdagangan : Rp12.281.748.153,00

3.30.1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : Rp12.281.748.153,00

3.31. Bidang Perindustrian : Rp7.869.002.000,00

3.31.1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi : Rp7.869.002.000,00

3.32. Bidang Transmigrasi : Rp50.000.000,00

3.32.1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi : Rp50.000.000,00

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah Rp92.071.995.943,00. Terdiri dari

4.1. Sekretariat Daerah : Rp. 44.714.281.659,00

4.1.1. Bagian Pemerintahan : Rp850.626.460,00

4.1.2. Bagian Organisasi : Rp898.660.000,00

4.1.3. Bagian Hukum : Rp597.271.500,00

4.1.4. Bagian Kesejahteraan Rakyat : Rp3.666.714.723,00

4.1.5. Bagian Umum : Rp34.198.608.389,00

4.1.6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam : Rp1.755.721.345,00

4.1.7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : Rp1.660.560.585,00

4.1.8. Bagian Administrasi Pembangunan : Rp547.520.767,00

4.1.9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : Rp538.597.890,00

4.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat : Rp47.357.714.284,00

5. Unsur Penunjang Pemerintahan sejumlah Rp456.152.944.434,00. Terdiri dari 5.1. Perencanaan : Rp9.807.022.608,00

5.1.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp9.807.022.608,00

5.2. Keuangan : Rp438.452.299.434,00

5.2.1. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah : Rp438.452.299.434,00

5.3. Kepegawaian : Rp7.418.622.392,00

5.3.1. Badan Kepegawaian Daerah : Rp7.418.622.392,00

5.4. Penelitian dan Pengembangan : Rp475.000.000,00

5.4.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp475.000.000,00

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sejumlah Rp10.896.438.947,00. Terdiri dari

6.1. Inspektorat Daerah : Rp10.896.438.947,00

6.1.1. Inspektorat : Rp10.896.438.947,00

7. Unsur Kewilayahan sejumlah Rp93.513.019.835,00. Terdiri

dari7.1. Kecamatan : Rp93.513.019.835,00

7.1.1. Kecamatan Wonosobo : Rp12.966.296.154,00

7.1.1.1. Kelurahan Wonosobo Barat : Rp847.405.630,00

7.1.1.2. Kelurahan Wonosobo Timur : Rp853.332.000,00

7.1.1.3. Kelurahan Jlamprang : Rp743.097.267,00

7.1.1.4. Kelurahan Kejiwan : Rp750.657.904,00

7.1.1.5. Kelurahan Sambek : Rp859.089.483,00

7.1.1.6. Kelurahan Mlipak : Rp718.459.993,00

7.1.1.7. Kelurahan Pagerkukuh : Rp706.360.490,00

7.1.1.8. Kelurahan Rojoimo : Rp871.057.040,00

7.1.1.9. Kelurahan Kramatan : Rp719.806.565,00

7.1.1.10. Kelurahan Tawangsari : Rp648.214.499,00

7.1.1.11. Kelurahan Jaraksari : Rp1.167.644.453,00

7.1.1.12. Kelurahan Bumireso : Rp653.304.592,00

7.1.1.13. Kelurahan Kalianget : Rp844.177.760,00

7.1.2. Kecamatan Kertek : Rp5.386.772.039,00

7.1.2.1. Kelurahan Kertek : Rp755.774.224,00

7.1.2.2. Kelurahan Wringinanom : Rp607.481.410,00

7.1.3. Kecamatan Selomerto : Rp5.064.166.508,00

7.1.3.1. Kelurahan Selomerto : Rp671.067.241,00

7.1.3.2. Kelurahan Wonorejo : Rp602.720.066,00

7.1.4. Kecamatan Leksono : Rp3.680.957.004,00

7.1.4.1. Kelurahan Leksono : Rp685.750.000,00

7.1.5. Kecamatan Watumalang : Rp4.468.448.619,00

7.1.5.1. Kelurahan Wonoroto : Rp591.258.400,00

7.1.6. Kecamatan Mojotengah : Rp5.577.097.458,00

7.1.6.1. Kelurahan Kalibeber : Rp846.327.419,00

7.1.6.2. Kelurahan Mudal : Rp705.673.963,00

7.1.6.3. Kelurahan Andongsili : Rp673.335.552,00

7.1.7. Kecamatan Garung : Rp4.119.715.466,00

7.1.7.1. Kelurahan Garung : Rp830.285.173,00

7.1.8. Kecamatan Kejajar : Rp5.055.633.457,00

7.1.8.1. Kelurahan Kejajar : Rp613.236.426,00

7.1.9. Kecamatan Kalikajar : Rp3.944.461.046,00

7.1.9.1. Kelurahan Kalikajar : Rp700.899.132,00

7.1.10. Kecamatan Sapuran : Rp4.217.161.483,00

7.1.10.1. Kelurahan Sapuran : Rp687.800.000,00

7.1.11. Kecamatan Kepil : Rp4.170.732.585,00

7.1.11.1. Kelurahan Kepil : Rp733.208.030,00

7.1.12. Kecamatan Kaliwiro : Rp3.856.074.431,00

7.1.12.1. Kelurahan Kaliwiro : Rp630.255.549,00

7.1.13. Kecamatan Wadaslintang : Rp4.015.211.866,00

7.1.13.1. Kelurahan Wadaslintang : Rp713.900.000,00

7.1.14. Kecamatan Sukoharjo : Rp2.981.333.852,00

7.1.15. Kecamatan Kalibawang : Rp2.577.377.606,00

8. Unsur Pemerintahan Umum sejumlah Rp6.424.675.120,00. Terdiri dari

8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik : Rp6.424.675.120,00.

8.1.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Rp6.424.675.120,00.

Selanjutnya proyeksi plafon anggaran belanja daerah tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan terdapat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.01.2.19.0.00.03.0000						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	657.208.135.065,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	652.683.135.065,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	652.683.135.065,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	161.018.106.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	77.620.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.445.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	450.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.911.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.237.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	750.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	130.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	410.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	70.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.770.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.096.300.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	57.467.456.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.375.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.600.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	2.100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.650.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	225.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	700.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.172.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.210.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	232.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	700.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.205.890.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	71.766.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.700.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.090.450.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	33.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.524.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	688.250.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	174.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	80.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	215.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	130.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	45.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.840.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	30.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.130.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	335.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	145.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	491.185.029.065,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	555.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	487.830.229.067,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	487.830.229.067,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	803.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.228.600.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	795.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	587.999.998,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	392.999.998,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.525.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.525.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	750.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	750.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.425.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.175.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.175.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	250.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	128.369.682.327,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	128.369.682.327,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	128.369.682.327,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.167.080.978,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.689.936.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	2.560.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	245.936.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	690.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	144.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	44.813.384.978,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	165.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	595.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	634.228.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	60.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	166.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	116.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	130.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	75.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	850.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	97.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.364.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	312.694.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	120.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	853.195.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	637.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	662.685.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan	55.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	289.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	120.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	677.479.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.335.083.978,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	41.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	75.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	330.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	122.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	145.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	594.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.420.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	46.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	95.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	138.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	138.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	35.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	490.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	865.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	775.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	530.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	75.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	170.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	1.257.531.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	160.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	160.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	557.531.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	557.531.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	95.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	95.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	245.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	245.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	326.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	65.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	261.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.754.070.349,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.146.865.349,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.146.865.349,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.830.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.830.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.375.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.375.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	847.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						Puskesmas Wonosobo 1	4.433.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	840.260.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	834.257.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.579.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.725.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.619.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	63.149.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.929.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	231.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	76.923.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	127.410.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.003.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.003.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	92.879.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.879.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	92.879.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						Puskesmas Kertek 1	3.382.510.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	744.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	744.267.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.275.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.290.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.951.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	165.864.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	153.742.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	34.405.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	148.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	103.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	103.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	165.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	165.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.472.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.472.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.472.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						Puskesmas Selomerto 1	5.844.157.099,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	802.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	790.793.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.942.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	177.430.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.299.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	273.262.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.470.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.024.817.099,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	5.024.817.099,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.024.817.099,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						Puskesmas Leksono 1	2.309.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	960.075.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	960.057.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135.972.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.443.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.702.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129.779.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.964.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.455.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	403.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.032.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	188.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	18.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	18.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	98.565.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.565.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	98.565.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.250.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.250.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.250.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Puskesmas Watumalang	3.567.345.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	863.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	863.186.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.504.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232.922.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	184.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.890.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	106.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	78.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	78.740.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.625.405.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.625.405.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.625.405.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						Puskesmas Mojotengah	4.554.528.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	966.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	966.503.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.448.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.090.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.460.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.485.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.510.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	209.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.530.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	134.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	97.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	97.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	40.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.547.588.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.547.588.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.547.588.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008						Puskesmas Garung	4.974.145.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.010.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.010.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	53.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91.510.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	232.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	239.770.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.780.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	127.230.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	55.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	55.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.908.105.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.908.105.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.908.105.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009						Puskesmas Kejajar 1	3.273.340.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	692.030.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	691.913.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.715.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.230.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	165.695.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.630.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.820.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.135.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	211.428.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	103.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	117.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	117.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.310.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.550.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.550.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.550.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010						Puskesmas Kalikajar 1	2.790.409.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	688.827.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	688.328.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.593.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	211.337.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.715.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	57.097.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	169.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	105.456.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	499.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	499.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	97.812.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.812.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	97.812.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.003.769.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.003.769.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.003.769.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0011						Puskesmas Sapuran	4.705.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	885.955.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	885.847.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.713.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.515.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	273.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	61.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	178.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	236.282.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	41.664.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	108.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	108.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.385.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.385.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.385.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.800.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.800.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.800.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012						Puskesmas Kepil 1	3.377.340.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	826.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	826.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.704.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.322.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	306.570.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	230.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.474.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	67.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.515.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.515.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.515.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013						Puskesmas Kaliwiro	4.953.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.295.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.295.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	83.425.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.530.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.288.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.295.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	55.375.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	440.400.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	240.695.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	96.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	57.852.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.624.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.624.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0013	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.624.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014						Puskesmas Wadaslintang 1	2.865.165.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	817.168.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	817.168.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.195.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.125.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.380.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.077.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	267.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.020.880,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	209.200.120,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	330.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	119.910.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.372.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.372.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.372.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1					NON URUSAN	2.026.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	2.026.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.026.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.026.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0014	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.026.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015						Puskesmas Sukoharjo 1	2.817.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.367.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.367.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.283.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.272.745.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.630.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.505.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	148.740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	758.690.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	90.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.665.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	10.295.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.295.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	84.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1					NON URUSAN	1.450.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	1.450.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.450.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.450.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0015	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.450.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016						Puskesmas Kalibawang	2.065.425.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.065.425.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.065.425.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	805.644.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	805.586.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.232.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.416.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.878.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	198.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.185.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.432.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.301.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	311.492.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	110.610.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	58.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	58.280,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	109.045.720,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109.045.720,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	109.045.720,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.150.735.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.150.735.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0016	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.150.735.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017						Puskesmas Wonosobo 2	1.565.258.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	480.198.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	479.762.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.679.840,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.472.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.580.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.276.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.795.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	360.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	99.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	435.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	435.160,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	52.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.032.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.032.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0017	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.032.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018						Puskesmas Kertek 2	2.676.613.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	668.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	668.741.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.170.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.001.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	266.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.662.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	175.358.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	61.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	49.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	49.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.743.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.003.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.003.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0018	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.003.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019						Puskesmas Selomerto 2	1.774.728.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	718.214.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	718.138.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.872.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.618.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.810.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	79.919.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.537.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76.376.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	366.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.940.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	85.086.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	76.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	76.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	122.324.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.324.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	122.324.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	934.190.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	934.190.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0019	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	934.190.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020						Puskesmas Leksono 2	1.660.189.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	918.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	918.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.754.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.245.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	199.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.041.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	66.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	421.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	35.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.980.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41.639.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.639.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.639.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	700.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	700.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0020	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	700.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021						Puskesmas Kejajar 2	1.889.610.650,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	907.489.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	907.489.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.155.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	105.979.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.380.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.376.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	413.314.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.615.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	141.240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	47.351.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.351.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	47.351.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	934.770.650,00
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	934.770.650,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0021	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	934.770.650,00
1.02.0.00.0.00.01.0022						Puskesmas Kalikajar 2	2.814.393.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	808.685.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	808.685.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.286.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.190.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.926.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.548.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	370.335.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	189.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.260.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	17.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70.755.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.755.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	70.755.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.934.953.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.934.953.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0022	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.934.953.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0023						Puskesmas Kepil 2	3.149.323.960,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.160.806.060,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.160.806.060,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.623.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	139.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	337.078.930,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.945.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.090.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.199.130,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.810.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.840.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	403.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.140.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	25.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	25.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	25.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.948.797.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.948.797.900,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.01.0023	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.948.797.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0024						Puskesmas Wadaslintang 2	2.035.898.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	777.721.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	777.702.950,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.976.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.096.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.933.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.490.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.549.750,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.228.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	335.530.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	40.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	18.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	18.050,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.677.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.677.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.677.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.233.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.233.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0024	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.233.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025						Puskesmas Sukoharjo 2	1.575.298.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	888.657.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	888.657.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.656.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	47.575.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	137.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.844.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.247.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	409.290.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	240.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.225.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.683.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.683.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.683.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	654.958.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	654.958.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0025	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	654.958.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0026						Laboratorium Kesehatan Daerah	600.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	600.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0026	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000						RSUD Setjonegoro	187.472.692.472,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.665.550.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	49.665.550.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	137.807.142.472,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.807.142.472,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.807.142.472,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	110.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	110.000.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	112.033.989.548,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	112.033.989.548,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.520.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	7.520.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.280.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.490.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	400.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	150.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.350.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.650.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	25.015.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.015.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	500.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.500.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	250.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	22.665.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	770.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	770.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	370.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	772.458.380,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	772.458.380,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	772.458.380,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	48.326.832.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	48.326.832.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	300.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	37.275.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	300.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	336.375.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	6.335.457.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.480.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan	0,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	164.190.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	114.190.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	58.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	56.190.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	25.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	25.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	980.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	550.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	200.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	250.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	300.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	80.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.385.509.168,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.500.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.500.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.421.509.168,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.421.509.168,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.002.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	19.415.620.003,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	13.242.694.483,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	645.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	545.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	225.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	320.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	193.725.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	105.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	105.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	88.725.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	88.725.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	160.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	160.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	5.122.523.952,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.122.523.952,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.058.465.968,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	64.057.984,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.474.617,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	35.474.617,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang	35.474.617,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.085.970.914,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.910.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.910.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.601.984.438,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.601.984.438,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.221.988,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.756.088,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.855.900,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.410.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	788.854.488,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	746.354.488,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.172.925.520,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	233.206.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	134.936.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	134.936.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	134.936.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	98.270.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	98.270.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	98.270.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.939.719.028,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	5.757.517.536,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.995.818.760,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.135.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	860.818.760,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	130.828.756,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan	130.828.756,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12.940.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12.940.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.436.822.780,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.030.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	235.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	171.822.780,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	815.317.240,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	126.263.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	689.054.240,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	6.100.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	6.100.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	298.105.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	298.105.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.585.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	23.735.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.850.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	182.201.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan	120.201.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan	120.201.492,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	62.000.000,00
1.04.2.15.2.10.03.0000	2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	62.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan polisi Pamong Praja	8.839.835.408,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.574.835.408,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.574.835.408,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.550.594.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	940.594.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	215.594.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	575.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali	585.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	500.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.024.241.408,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.627.690.408,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.573.114.408,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.576.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.700.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.200.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.675.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.675.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.800.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.376.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.376.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					NON URUSAN	265.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	265.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	265.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.679.415.755,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.679.415.755,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.679.415.755,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.495.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	635.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	85.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	200.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	160.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	810.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	455.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	200.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.729.415.755,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.754.415.755,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.754.415.755,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.780.169.793,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.293.359.793,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	827.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	250.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	200.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	577.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	380.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	45.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.440.530.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.270.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	15.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	130.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	650.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	65.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	75.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	170.530.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.530.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.463.172.600,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.463.172.600,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.183.172.600,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	40.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	195.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	175.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	40.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	40.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	25.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	284.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	284.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	240.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	44.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.083.657.193,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.172.712.713,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.172.712.713,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.944.480,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.444.480,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.459.310.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	7.459.310.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	1.896.600.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	1.896.600.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.896.600.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	140.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	140.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	50.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	50.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.702.710.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.702.710.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.527.710.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	150.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	200.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	300.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	35.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	250.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	720.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	720.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	70.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	500.000.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1					NON URUSAN	27.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	27.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.500.000,00
1.06.2.13.0.00.05.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.500.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000						Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	16.604.930.035,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.765.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.765.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.870.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.570.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.420.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	150.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	80.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	80.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	120.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	630.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	255.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	75.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	30.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	100.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	375.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	150.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	225.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	245.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	35.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.919.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.869.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.619.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	7.619.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.450.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.769.002.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	350.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	250.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan	250.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	250.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	50.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2					NON URUSAN	5.920.928.035,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	5.920.928.035,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.920.928.035,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.813.378.035,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.813.378.035,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.550.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.550.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00
2.07.3.31.3.32.01.0000	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.09.3.27.3.25.02.0000						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	57.944.378.902,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.299.755.502,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	24.299.755.502,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	125.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	125.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	125.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	140.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah	140.000.000,00
000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.000.000,00
000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.919.755.502,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.511.701.502,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.511.701.502,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.294.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.100.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.194.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	665.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	923.760.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.800.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	748.960.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33.644.623.400,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	830.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	80.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	750.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	475.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	275.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	125.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	275.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	175.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.814.623.400,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.395.448.400,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.845.448.400,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.000.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.695.448.400,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	200.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.250.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.250.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	27.025.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	125.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	50.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	26.900.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.000.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1.500.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15.950.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.250.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong	200.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	396.675.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	396.675.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	396.675.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	897.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	897.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	297.500.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	75.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	100.000.000,00
2.09.3.27.3.25.02.0000	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	250.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000						Dinas lingkungan Hidup	18.577.934.425,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.650.046.514,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9.650.046.514,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	240.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	140.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	90.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	50.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	696.200.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	546.200.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	145.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	80.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	321.200.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	50.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.799.672.414,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.799.672.414,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.569.672.414,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	230.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	50.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	50.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	80.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	80.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.433.025.900,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	6.433.025.900,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	130.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6.043.025.900,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	100.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	316.148.200,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.278.200,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.778.200,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.870.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.870.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2					NON URUSAN	8.927.887.911,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	8.927.887.911,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.927.887.911,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.331.002.911,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.331.002.911,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.885.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.117.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.088.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.000.000,00
2.11.1.03.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.075.936.587,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.075.936.587,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.075.936.587,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.065.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	915.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	915.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	150.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	150.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	185.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	125.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	40.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	25.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	130.149.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	95.149.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	40.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.149.360,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	40.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.695.787.227,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.062.287.227,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.062.287.227,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.997.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.997.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.300.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.300.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.202.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.202.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.093.891.583,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.129.874.583,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	750.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	305.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	90.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	215.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	75.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	315.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	160.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	130.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	260.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	220.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	220.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	100.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	120.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	81.920.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.920.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.920.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.667.954.583,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.600.914.583,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.600.914.583,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.240.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.080.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.800.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.900.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.922.517.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	597.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	25.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	45.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	502.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	95.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	221.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	126.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.565.317.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	1.899.792.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	121.640.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	863.412.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	321.360.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	200.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	81.380.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	312.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	855.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	795.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	60.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.191.850.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	36.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.129.187.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	680.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	20.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.263.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	65.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	60.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	618.675.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8.090.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	32.425.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga	578.160.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	4.759.800.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	388.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	38.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.371.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja	2.034.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.237.400.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2					NON URUSAN	41.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	41.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	41.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.500.000,00
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.500.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	10.436.385.223,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.137.641.161,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.992.241.161,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.465.148.960,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.465.148.960,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	65.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	227.865.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	199.074.970,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	107.796.490,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.695.200.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	45.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	125.212.500,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.582.089.631,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	60.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.522.089.631,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	125.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.302.089.631,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	95.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.945.002.570,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.561.655.475,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.491.095.475,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.560.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.525.686,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.125.686,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.821.409,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.821.409,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	86.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	86.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	86.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	86.400.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	59.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	59.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	59.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	59.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2					NON URUSAN	298.744.062,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	298.744.062,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	298.744.062,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.744.062,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.744.062,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.914.319.029,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.914.319.029,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.914.319.029,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	80.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	80.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	35.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	122.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	122.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	122.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	611.687.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	611.687.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	80.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	416.687.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	115.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	145.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	145.500.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.899.632.029,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.925.243.469,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.925.243.469,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.808.552,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	827.808.552,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.580.008,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.580.008,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	7.082.873.645,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	869.683.218,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	844.153.218,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	592.479.194,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	486.270.818,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	76.208.376,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	30.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.674.024,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	44.156.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	207.518.024,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	25.530.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	25.530.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25.530.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.213.190.427,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	327.216.660,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	196.450.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	196.450.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	130.766.660,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	130.766.660,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.885.973.767,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.506.266.365,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.266.365,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.423.530,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.423.530,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.127.280,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.127.280,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.156.592,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.156.592,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2					NON URUSAN	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
2.24.2.23.0.00.01.0000	2	24	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	18.608.561.848,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.045.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.045.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.975.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	945.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	40.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	905.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	980.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	80.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	900.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	50.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	70.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	40.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	40.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	16.563.561.848,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	16.563.561.848,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.677.526.592,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.490.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik	1.390.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.157.526.592,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	309.325.592,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.848.201.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	30.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.195.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.195.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	195.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	350.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	245.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	245.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	245.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.758.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.533.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.373.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	40.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	225.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	75.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.688.035.256,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.936.100.576,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.936.100.576,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.434.680,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.834.680,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.600.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.762.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.262.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.738.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.738.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000						Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.152.849.833,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.871.101.680,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN	1.871.101.680,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	43.692.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	43.692.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	43.692.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	87.239.680,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.239.680,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	37.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	50.239.680,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	590.170.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	590.170.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	525.170.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	350.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	350.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	300.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	800.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	800.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	800.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.281.748.153,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.281.748.153,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	17.544.990,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha	17.544.990,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.544.990,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	815.783.375,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	731.933.375,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	645.183.375,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	86.750.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di	83.850.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	40.500.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	43.350.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	255.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	165.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	165.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	90.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	90.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	32.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah	32.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	32.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	110.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	110.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	50.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	20.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	20.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.031.419.788,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.922.503.542,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.922.503.542,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.900.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.600.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.737.639.246,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.004.065.332,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.732.323.914,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.377.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.377.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
3.30.2.17.0.00.03.0000	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001						Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	850.626.460,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	850.626.460,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	850.626.460,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	546.768.038,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	462.366.638,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	313.530.438,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	76.427.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	72.409.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	84.401.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	84.401.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	303.858.422,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.999.262,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.334.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.495.062,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.770.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.659.160,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.659.160,00
4.01.0.00.0.00.01.0001	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002						Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	898.660.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.760.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.800.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.960.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	690.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	270.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0002	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	170.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003						Bagian Hukum Sekretariat Daerah	597.271.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	405.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	405.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	120.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	95.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	190.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	192.271.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.071.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.117.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.134.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.820.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0003	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004						Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	3.666.714.723,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.489.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.489.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.177.128.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	211.871.800,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	177.714.723,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.496.037,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.371.037,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.925.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.288.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.288.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.930.686,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.930.686,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005						Bagian Umum Sekretariat Daerah	34.198.608.389,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.972.015.729,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.972.015.729,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.878.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.600.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	300.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.994.956.580,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	581.098.080,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.386.858.500,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.750.498.772,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.156.687,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.342.085,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.753.137.308,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	867.616.437,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.520.871,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	900.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	500.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4					NON URUSAN	1.300.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	1.300.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.300.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.190.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.190.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0005	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	110.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006						Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	1.755.721.345,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.755.721.345,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	1.755.721.345,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.599.021.190,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	621.296.990,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	250.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	371.296.990,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	977.724.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	927.724.200,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan	50.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	156.700.155,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.480.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.023.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.423.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.197.155,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.197.155,00
4.01.0.00.0.00.01.0006	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	1.660.560.585,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	692.433.800,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.381.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.303.400,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.249.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.923.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.923.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.615.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.815.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.800.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.700.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.700.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	508.888.785,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	79.537.025,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	294.020.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0007	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	135.331.760,00
4.01.0.00.0.00.01.0008						Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	547.520.767,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	337.816.085,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	337.816.085,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	37.776.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	150.943.748,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	149.096.337,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.800.487,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.800.487,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.869.801,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.930.686,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4					NON URUSAN	138.904.195,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	138.904.195,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	138.904.195,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.275.494,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.275.494,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.780.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.628.701,00
4.01.0.00.0.00.01.0008	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.628.701,00
4.01.0.00.0.00.01.0009						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	538.597.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	538.597.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	538.597.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	283.097.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	283.097.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	148.097.890,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	55.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	255.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.400.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	X					NON URUSAN	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01		PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
4.01.0.00.0.00.01.0009	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47.357.714.284,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	21.835.064.690,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	21.835.064.690,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	5.611.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.180.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	700.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	480.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	40.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	2.991.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.142.380.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	195.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	437.860.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.400.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	1.400.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.223.824.690,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.499.283.701,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.499.283.701,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.592.860.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.519.860.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.288.688,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	616.288.688,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	250.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	250.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	44.370.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	44.370.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	9.821.022.301,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	9.821.022.301,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					NON URUSAN	25.522.649.594,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	25.522.649.594,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.522.649.594,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.922.649.594,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.922.649.594,00
5.01.5.05.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.282.022.608,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10.282.022.608,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	9.807.022.608,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	540.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	400.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	300.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	100.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	40.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.083.097.265,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	350.880.785,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	132.200.950,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	218.679.835,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	382.216.480,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	242.216.480,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	140.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	350.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	200.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	150.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.183.925.343,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.623.280,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.385.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.238.280,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.535.278.771,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.535.278.771,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.082.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	800.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.782.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	15.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	460.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.858.240,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.658.240,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.083.052,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.583.052,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	475.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	475.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	275.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	125.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	50.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	100.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	200.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	50.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	25.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	75.000.000,00
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	03	2.02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000						Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	61.706.253.628,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02				KEUANGAN	61.706.253.628,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.020.500.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	345.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	19.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	24.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	7.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	12.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	198.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	51.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	293.500.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	293.500.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	157.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	157.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	225.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	225.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	885.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	885.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	35.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	550.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.301.815.317,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.301.815.317,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	440.995.306,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	885.820.011,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	975.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.498.938.311,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.781.438.311,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.781.438.311,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	839.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	233.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	800.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.663.500.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.155.500.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0001						Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	376.746.045.806,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	376.746.045.806,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	376.746.045.806,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.364.431.070,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.500.000.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0001	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.881.614.736,00
5.03.0.00.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian Daerah	7.418.622.392,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	6.923.472.392,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.439.420.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	406.900.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	218.900.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	82.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	50.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	35.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	215.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	200.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	701.020.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	60.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	611.020.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	116.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	7.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	36.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.484.052.392,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.970.452.392,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.908.652.392,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.800.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.600.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.600.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5					NON URUSAN	495.150.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	495.150.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	495.150.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.150.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.250.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.400.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00
5.03.0.00.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						inspektorat	10.896.438.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.896.438.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	10.896.438.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	588.704.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	443.704.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50.480.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	107.180.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	35.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	37.814.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	73.730.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	20.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	119.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	145.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	140.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	140.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.167.734.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.276.134.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.276.134.947,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	40.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.600.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Wonosobo	12.966.296.154,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	12.966.296.154,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	12.966.296.154,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	142.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	98.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	98.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	156.015.463,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.015.463,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.015.463,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.290.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	71.290.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.290.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	135.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	135.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.371.390.691,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.029.073.991,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.029.073.991,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.316.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.709.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.606.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002						Kelurahan Wonosobo Barat	847.405.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	514.005.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	439.005.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	424.005.630,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	236.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.859.302,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.259.302,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.100.698,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.440.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.660.698,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003						Kelurahan Wonosobo Timur	853.332.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	678.312.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	609.982.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	598.982.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	68.330.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	68.330.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	131.019.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.919.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.865.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.205.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.940.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.408.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.150.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0003	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004						Kelurahan Jlamprang	743.097.267,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	467.754.378,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	378.214.378,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.214.378,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	89.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	89.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	200.342.889,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.965.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.685.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.377.889,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.377.889,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0004	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005						Kelurahan Kejiwan	750.657.904,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	452.579.784,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	356.990.784,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	346.990.784,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	95.589.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	95.589.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.895.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.895.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	15.895.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	215.183.120,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.780.320,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.960.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.280.320,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.540.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.902.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.346.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.556.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0005	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006						Kelurahan Sambek	859.089.483,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	465.207.478,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	311.797.478,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.797.478,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	153.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	153.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.950.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.950.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.950.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.598.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.598.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	31.598.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	313.334.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.934.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.434.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.400.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.280.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.120.005,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0006	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007						Kelurahan Mlipak	718.459.993,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	402.089.183,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	298.799.545,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	288.799.545,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	103.289.638,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	103.289.638,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76.810.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76.810.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	66.810.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.060.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.060.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	8.060.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	231.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.740.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.040.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.160.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0007	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.160.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008						Kelurahan Pagerkukuh	706.360.490,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	496.063.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	394.214.475,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.158.555,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	383.055.920,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	101.848.765,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	101.848.765,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.374.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.374.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.893.880,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.480.880,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.812.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.812.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	9.812.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	176.110.490,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.423.120,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.070.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.498.270,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.268.450,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.485.800,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.900.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.685.360,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.685.360,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.502.010,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.656.810,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.845.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0008	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009						Kelurahan Rojoimo	871.057.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	431.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	376.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	366.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	410.257.040,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.057.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.557.040,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0009	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010						Kelurahan Kramatan	719.806.565,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	468.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	408.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	398.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	67.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	57.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	154.556.565,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.314.405,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.994.405,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.242.160,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.442.160,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0010	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011						Kelurahan Tawangsari	648.214.499,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	346.960.970,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	288.380.970,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	278.380.970,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	58.580.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	58.580.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	86.016.815,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86.016.815,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300.595,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.716.220,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	59.480.474,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.480.474,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.780.474,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7					NON URUSAN	125.756.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	125.756.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	125.756.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.644.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.544.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.112.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0011	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.112.240,00
7.01.0.00.0.00.01.0012						Kelurahan Jaraksari	1.167.644.453,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.167.644.453,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01				KECAMATAN	1.167.644.453,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	775.422.430,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	695.073.430,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	575.073.430,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	80.349.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.349.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	185.779.570,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	185.779.570,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	175.779.570,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	186.442.453,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.114.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.264.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.867.360,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.867.360,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.461.093,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0012	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.461.093,00
7.01.0.00.0.00.01.0013						Kelurahan Bumireso	653.304.592,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	396.044.592,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	328.044.592,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	328.044.592,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	212.260.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.700.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0013	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014						Kelurahan Kalianget	844.177.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	572.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	492.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	472.800.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	236.377.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.597.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.097.760,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.880.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0014	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Kertek	5.386.772.039,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	119.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	73.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	73.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	140.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	165.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	165.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.747.272.039,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.405.384.877,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.384.877,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.204.650,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.999.400,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.805.250,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.226.593,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.226.593,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.240.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.040.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.215.919,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.215.919,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002						Kelurahan Kertek	755.774.224,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	573.955.350,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	520.099.725,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.823.950,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	507.275.775,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	53.855.625,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	53.855.625,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	132.274.599,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.014.599,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.551.499,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.150.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.313.100,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.260.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.760.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7					NON URUSAN	2.044.275,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	2.044.275,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.044.275,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.044.275,00
7.01.0.00.0.00.02.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.044.275,00
7.01.0.00.0.00.02.0003						Kelurahan Wringinanom	607.481.410,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7					UNSUR KEWILAYAHAN	607.481.410,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01				KECAMATAN	607.481.410,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	296.798.225,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	213.566.225,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.353.625,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	201.212.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	83.232.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	83.232.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.624.125,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.624.125,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.444.125,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.180.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.127.062,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.127.062,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	64.127.062,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	207.931.998,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.231.998,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.847.998,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.960.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.724.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.700.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.900.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.800.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0003	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Selomerto	5.064.166.508,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	147.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	147.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	139.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.590.166.508,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.203.693.318,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.203.693.318,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.714.450,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.760.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.080.240,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.874.210,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.579.240,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.579.240,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.179.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.179.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7					NON URUSAN	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002						Kelurahan Selomerto	671.067.241,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7					UNSUR KEWILAYAHAN	671.067.241,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01				KECAMATAN	671.067.241,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	417.984.105,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	377.984.105,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357.984.105,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	215.583.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.880.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.250.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.630.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.703.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.900.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.303.136,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.800.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003						Kelurahan Wonorejo	602.720.066,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	352.375.296,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	290.375.296,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	280.375.296,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.033.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.967.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	214.344.770,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.770.290,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.020.290,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.250.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.230.304,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.530.304,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.344.176,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.586.176,00
7.01.0.00.0.00.03.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.758.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Leksono	3.680.957.004,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	116.150.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.360.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	66.360.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	44.790.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	44.790.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.130.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.130.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.130.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.243.677.004,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.285.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.285.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.878.357.004,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.878.357.004,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.623.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.119.600,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.800.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.410.300,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.093.100,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.820.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.820.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.592.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.592.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002						Kelurahan Leksono	685.750.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	476.903.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	424.799.375,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.445.390,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	372.353.985,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	52.103.625,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	52.103.625,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.320.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.320.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.900.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.420.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.727.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.727.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	18.727.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	125.800.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.117.480,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.075.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.917.780,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.724.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.380.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.070.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.310.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.802.520,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.800.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.002.520,00
7.01.0.00.0.00.05.0000						Kecamatan Watumalang	4.468.448.619,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	166.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	86.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	86.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	138.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	78.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	78.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	160.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.879.448.619,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.076.549.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.076.549.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	561.899.619,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336.899.619,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002						Kelurahan Wonoroto	591.258.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	57.024.375,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.024.375,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	57.024.375,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	410.654.025,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	349.641.525,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	337.641.525,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	61.012.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	61.012.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	9.500.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.080.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.516.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.516.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.940.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.900.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.040.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.624.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.624.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000						Kecamatan Mojotengah	5.577.097.458,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	140.408.231,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.996.270,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.996.270,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.411.961,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	85.411.961,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	165.217.096,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.217.096,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.217.096,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	181.932.663,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	181.932.663,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	181.932.663,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.883.356,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.883.356,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.143.660,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.739.696,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.992.656.112,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.608.431.512,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.608.431.512,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.724.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.704.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002						Kelurahan Kalibeber	846.327.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	570.710.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	505.710.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	415.710.419,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.857.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	57.857.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52.457.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.400.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	192.760.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.900.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.700.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.200.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.160.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0002	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.660.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003						Kelurahan Mudal	705.673.963,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	512.283.963,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407.399.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	395.399.600,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	104.884.363,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	104.884.363,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	138.010.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.725.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.225.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.160.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.440.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.720.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.125.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.415.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.309.500,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7					NON URUSAN	3.380.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	3.380.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.380.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.380.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0003	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004						Kelurahan Andongsili	673.335.552,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7					UNSUR KEWILAYAHAN	664.835.552,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01				KECAMATAN	664.835.552,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	451.212.665,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	319.959.665,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.863.660,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	306.096.005,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	131.253.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	131.253.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	138.622.887,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.502.887,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.283.087,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.159.800,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.120.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.720.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7					NON URUSAN	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0004	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000						Kecamatan Garung	4.119.715.466,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	4.119.715.466,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01				KECAMATAN	4.119.715.466,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	152.772.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83.236.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.436.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69.536.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	69.536.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	207.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	207.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	207.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.538.743.466,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.255.259.365,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.255.259.365,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.100.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.100.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.884.101,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	19.384.101,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002						Kelurahan Garung	830.285.173,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	557.395.573,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	512.395.573,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	397.395.573,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	45.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	51.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	74.340.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.300.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.040.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.540.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7					NON URUSAN	114.049.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	114.049.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.049.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.320.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.729.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.729.600,00
7.01.0.00.0.00.08.0000						Kecamatan Kejajar	5.055.633.457,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	806.894.712,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01				KECAMATAN	806.894.712,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	91.721.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	48.721.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	48.721.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	183.109.902,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	71.609.902,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	71.609.902,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	135.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	135.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83.071.410,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.071.410,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.071.410,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	266.492.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.736.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.696.400,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.800.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	54.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.300.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.956.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.656.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7					NON URUSAN	4.248.738.745,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	4.248.738.745,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.248.738.745,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.098.765.145,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.098.765.145,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.473.600,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.473.600,00
7.01.0.00.0.00.08.0002						Kelurahan kejajar	613.236.426,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7					UNSUR KEWILAYAHAN	613.236.426,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01				KECAMATAN	613.236.426,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	494.916.426,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	301.440.269,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.440.269,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	193.476.157,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	193.476.157,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.050.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.950.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	76.320.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.320.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.760.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.240.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000						Kecamatan Kalikajar	3.944.461.046,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	156.799.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73.069.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	55.379.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.690.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69.730.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	69.730.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.511.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	121.511.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	121.511.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	56.672.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.672.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.457.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.215.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.760.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	101.760.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	93.920.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.840.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	118.992.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	118.992.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	73.159.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.833.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.308.727.046,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.247.046,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.014.247.046,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.420.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.360.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.060.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.560.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.700.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.860.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002						Kelurahan Kalikajar	700.899.132,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	540.172.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	522.765.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.100.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	417.665.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	17.407.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	17.407.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.156.532,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.156.532,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.356.532,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.800.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.050.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.050.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	10.050.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	47.346.400,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.760.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	650.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.910.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.900.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.686.400,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.950.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	736.400,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7					NON URUSAN	61.173.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	61.173.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.173.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.173.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.173.600,00
7.01.0.00.0.00.10.0000						Kecamatan Sapuran	4.217.161.483,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	4.217.161.483,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01				KECAMATAN	4.217.161.483,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	80.060.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.060.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	60.060.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	126.382.250,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	105.382.250,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	105.382.250,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	176.420.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	176.420.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	160.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.420.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	138.116.882,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	138.116.882,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	93.228.132,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.596.750,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.967.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.325.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.678.182.351,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.330.741.851,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.330.741.851,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.360.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.963.200,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.248.300,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.655.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.054.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.580.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.980.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002						Kelurahan Sapuran	687.800.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	567.316.132,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	493.225.072,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.585.860,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	484.639.212,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	74.091.060,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	74.091.060,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.069.040,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.069.040,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.816.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.253.040,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	26.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52.781.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.636.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.986.900,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.650.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.440.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.080.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.360.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.705.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.205.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7					NON URUSAN	21.632.928,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	21.632.928,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.632.928,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.132.928,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.048.685,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.940.340,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.143.903,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000						Kecamatan Kepil	4.170.732.585,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	4.155.732.585,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01				KECAMATAN	4.155.732.585,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	160.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	157.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	157.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.603.732.585,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.271.219.474,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.271.219.474,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.970.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.780.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.190.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.171.513,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	63.171.513,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.371.598,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.971.598,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.400.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7					NON URUSAN	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002						Kelurahan Kepil	733.208.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7					UNSUR KEWILAYAHAN	733.208.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01				KECAMATAN	733.208.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	529.287.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	486.339.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.764.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	475.575.030,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	42.948.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	42.948.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.016.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.016.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.016.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.375.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.375.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	26.375.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.530.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.392.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	800.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	330.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.620.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.920.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.600.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.518.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.318.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000						Kecamatan kaliwiro	3.856.074.431,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	73.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	38.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	38.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	167.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	83.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	89.103.455,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89.103.455,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	47.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.103.455,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.403.970.976,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.929.106.815,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.929.106.815,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.973.785,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.600.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.900.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.273.785,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.890.376,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.300.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.590.376,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002						Kelurahan Kaliwiro	630.255.549,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	387.328.549,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	326.928.549,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.927.390,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.001.159,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	60.400.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60.400.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.977.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.977.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.880.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.097.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	167.950.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.640.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.360.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.450.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.720.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.730.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0002	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000						Kecamatan Wadaslintang	4.015.211.866,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	113.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	160.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.437.211.866,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.111.111.867,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.111.111.867,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.600.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.499.999,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.779.999,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.720.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002						Kelurahan Wadaslintang	713.900.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	520.389.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450.389.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	440.389.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.840.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.840.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.840.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	141.171.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.327.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.487.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.540.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.244.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.144.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.600.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7					NON URUSAN	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0002	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000						Kecamatan Sukoharjo	2.981.333.852,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.981.333.852,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01				KECAMATAN	2.981.333.852,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	113.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.000.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.842.649,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	100.342.649,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.342.649,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65.400.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.400.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.400.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	140.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	140.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	130.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.444.591.203,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.217.091.203,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.217.091.203,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000						Kecamatan Kalibawang	2.577.377.606,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	103.526.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.518.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.518.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.008.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	60.008.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	138.106.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.416.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.416.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	121.690.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	121.690.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	56.951.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.951.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.951.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	169.130.678,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	169.130.678,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	130.558.678,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.242.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.330.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	94.468.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94.468.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	94.468.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.015.195.928,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.934.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.967.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.967.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.804.988.492,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.804.988.492,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.434.017,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	993.500,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.563.227,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.600,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.690,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.880.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.060.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.240.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.520.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.779.419,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.483.259,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.796.160,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.424.675.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.424.675.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.424.675.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	580.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	580.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	580.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.724.400.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.724.400.000,00

KODE						URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPAS (Rp)
1						2	3
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.724.400.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	400.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	400.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	300.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	300.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	425.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	425.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.995.275.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.570.275.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.516.455.120,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.820.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	50.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00
TOTAL							2.054.105.153.849,00

Sedangkan untuk Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja terdapat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1.	**Belanja Operasi**	**1.503.375.557.425**
	a. Belanja Pegawai	862.068.087.937
	b. Belanja Barang Jasa	525.745.347.800
	c. Belanja Subsidi	0
	d. Belanja Hibah	109.163.071.688
	e. Belanja Bantuan Sosial	6.399.050.000
2.	**Belanja Modal**	**173.920.266.618**
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**5.500.000.000**
4.	**Belanja Transfer**	**371.209.329.806**
	a. Belanja Bagi Hasil	14.881.614.736
	b. Belanja Bantuan Keuangan	356.327.715.070
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**2.054.005.153.849**

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan daerah diluar pendapatan daerah, dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran daerah diluar belanja daerah. Rencana pembiayaan daerah dalam Prioritas dan Plafon Angggaran Sementara Tahun 2025 adalah sebagaimana dalam tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.695.224.101
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	10.695.224.101
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**10.695.224.101**
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.080.000.000
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	7.080.000.000
6.2.03.	Pembayaran hutang Jatuh Tempo	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**7.080.000.000**
	Pembiayaan Netto	**3.615.224.101**

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2025. Dalam hal terdapat perkembangan keadaan dan/atau regulasi yang menyebabkan penambahan/pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan maupun pagu indikatif anggaran setelah kesepakatan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, maka penyesuaian lebih lanjut dilaksanakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Angggaran 2025 dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa merubah nota kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 yang telah ditandatangani.

Wonosobo, 25 Juli 2024

BUPATI WONOSOBO
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA

EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H
KETUA DPRD

AMIR HUSEIN
WAKIL KETUA

SUMARDIYO, SE
WAKIL KETUA

AGUS RIYADI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.445.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	450.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.911.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.237.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	750.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	130.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	410.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	70.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	200.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.770.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	6.096.300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.375.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.600.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	2.100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.650.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	225.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	700.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	600.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.172.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.210.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	232.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	700.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34.205.890.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	71.766.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.700.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	33.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.524.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	688.250.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	174.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	215.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	130.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	45.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.000.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.130.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	487.830.229.067,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	795.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	392.999.998,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	150.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.175.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	2.560.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	245.936.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	690.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.000.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	144.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	165.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.900.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.960.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.704.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.040.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.760.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.860.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.100.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.713.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.540.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.080.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.656.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.232.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.754.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.504.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135.972.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.976.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.872.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.195.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.680.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.640.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.623.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	595.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.270.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.275.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.610.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.322.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.942.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	83.425.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.715.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.010.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.480.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.170.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.240.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.370.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	47.575.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.416.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.840.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.245.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.443.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.286.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.096.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.618.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	53.250.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.125.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.448.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	634.228.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	139.920.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	166.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.920.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.290.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.080.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.020.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.920.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.220.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.230.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.080.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.340.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.001.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.155.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.640.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.440.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.740.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.860.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.702.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.190.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.933.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.810.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.480.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.520.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.380.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.090.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.990.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	116.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.450.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	130.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	850.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	97.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.680.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.364.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.593.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.579.900,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.080.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.530.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.920.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.679.840,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32.515.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.980.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.360.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.120.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.900.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.878.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.320.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	960.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.260.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.250.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	960.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.630.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.520.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.077.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.460.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.920.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	312.694.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	720.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	360.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	540.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	120.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	853.195.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	211.337.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.725.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	306.570.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	177.430.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	165.695.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.288.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.472.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	273.020.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	266.470.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	105.979.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.951.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	137.280.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	198.220.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232.922.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	199.140.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.926.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129.779.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.490.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	79.919.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.505.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	267.270.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.485.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	337.078.930,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.945.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	637.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.650.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.619.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.920.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.590.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.630.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.295.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.580.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.080.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.040.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.380.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.980.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.760.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.185.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.980.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.020.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.050.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.950.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.180.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.260.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.700.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.340.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.090.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	662.685.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.199.130,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	55.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	289.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.715.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	63.149.800,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.299.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.820.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	55.375.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.276.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	61.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.662.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.376.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.920.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.844.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.432.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	59.610.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.041.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.548.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.964.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.549.750,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.537.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.025.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91.510.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.180.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.510.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.810.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	120.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	720.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	677.479.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.929.600,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.880.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.135.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.795.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	178.590.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.150.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.750.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	165.864.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.247.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.301.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	184.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	66.480.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	57.097.100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	370.335.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44.455.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.228.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76.376.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	148.740.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	232.260.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.020.880,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	209.490.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	58.840.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	440.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.335.083.978,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	41.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	6.300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	231.990.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	230.390.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	211.428.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	273.262.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	142.590.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	236.282.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	175.358.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	413.314.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	153.742.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	409.290.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.890.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	311.492.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	421.590.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	169.680.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	189.990.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	403.540.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	335.530.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	366.590.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	758.690.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	239.770.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	209.200.120,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.530.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	403.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	240.695.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	330.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Laboratorium Kesehatan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	122.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.250.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.740.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	360.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	15.120.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	360.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.020.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	480.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.640.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.040.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	240.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	270.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	540.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	240.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	330.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	180.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.140.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	145.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	594.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.420.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	210.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	900.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.250.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	240.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.840.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.880.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	46.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	900.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	240.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	120.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	240.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	360.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.440.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	60.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	360.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	90.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.520.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	95.550.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.440.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	76.923.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.474.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.080.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.480.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.860.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	96.180.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.743.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.790.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.615.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	34.405.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.225.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	270.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	35.540.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.220.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.560.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.260.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.032.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.960.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.940.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	19.665.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.780.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.060.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.220.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	127.410.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	67.470.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	103.980.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.700.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	99.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	57.852.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	41.664.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	61.620.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	141.240.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	148.020.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	106.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.980.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	110.610.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	105.456.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	17.790.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	188.490.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	40.860.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	85.086.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.950.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	127.230.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	119.910.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	134.490.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	138.760.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.003.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	117.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.077.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	435.160,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	49.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	103.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	58.280,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	499.400,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	18.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	18.050,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.295.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	97.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	76.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	108.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	35.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	490.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	530.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	25.320.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	170.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.700.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	160.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	557.531.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	95.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	245.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	261.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	92.879.700,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35.610.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.310.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.470.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	52.440.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.385.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.743.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	47.351.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	165.870.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.683.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	78.740.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.639.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	97.812.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	109.045.720,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	70.755.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	98.565.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.677.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	122.324.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	55.760.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.372.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40.340.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.146.865.349,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.830.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.375.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	722.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.550.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Watumalang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.625.405.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.800.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.515.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wonosobo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.032.620.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kejajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	934.770.650,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.472.270.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.024.817.099,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	654.958.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	700.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kertek 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.003.080.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalibawang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.150.735.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kaliwiro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.624.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Leksono 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.250.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Selomerto 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	934.190.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.934.953.980,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.233.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kalikajar 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.003.769.900,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Mojotengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.547.588.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.908.105.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kesehatan	Puskesmas Kepil 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.948.797.900,00
NON URUSAN	Dinas Kesehatan	Puskesmas Sukoharjo 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.450.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Kesehatan	Puskesmas Wadaslintang 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.026.625.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RSUD Setjonegoro	RSUD Setjonegoro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	49.665.550.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RSUD Setjonegoro	RSUD Setjonegoro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.807.142.472,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RSUD Setjonegoro	RSUD Setjonegoro	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	110.000.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.280.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.490.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	400.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.350.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.650.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	22.665.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	370.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	772.458.380,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian Jembatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	300.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	37.275.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	336.375.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	6.335.457.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.480.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jembatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	58.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	56.190.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.421.509.168,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	225.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	320.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	105.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	88.725.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	160.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.058.465.968,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	64.057.984,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	35.474.617,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.910.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.601.984.438,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.756.088,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.855.900,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.410.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	746.354.488,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	134.936.492,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	98.270.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.135.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	860.818.760,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	130.828.756,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12.940.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.030.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	235.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	171.822.780,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	126.263.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	689.054.240,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	6.100.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	298.105.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	23.735.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.850.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	120.201.492,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	62.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	215.594.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	575.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	30.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.573.114.408,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.576.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.675.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.376.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.000.000,00
NON URUSAN	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	120.000.000,00
NON URUSAN	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00
NON URUSAN	Satuan polisi Pamong Praja	Satuan polisi Pamong Praja	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	85.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	160.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.754.415.755,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	380.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	70.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	15.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	130.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	650.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	65.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.530.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.183.172.600,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	70.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	240.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	44.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.172.712.713,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.444.480,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	1.896.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.527.710.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	35.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	70.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	70.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	70.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.420.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	80.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	120.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	225.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.450.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.769.002.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	350.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	50.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.813.378.035,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.550.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	15.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	125.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.511.701.502,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80.100.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.194.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.800.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	748.960.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	275.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	125.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.000.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.695.448.400,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.250.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.000.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1.500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15.950.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	396.675.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	297.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	90.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	145.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	80.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	321.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.569.672.414,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	230.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	130.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6.043.025.900,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.778.200,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.870.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.331.002.911,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.117.000,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.088.000,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.000.000,00
NON URUSAN	Dinas lingkungan Hidup	Dinas lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	915.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.149.360,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.062.287.227,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.997.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.300.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.202.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	90.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	215.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	75.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	160.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.920.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.600.914.583,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.080.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.900.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	45.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	95.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	221.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	126.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	121.640.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	863.412.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	321.360.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	200.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	81.380.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	312.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	795.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.129.187.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	680.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.263.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	65.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan KB Pria	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	8.090.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	32.425.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	578.160.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	38.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.034.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.237.400.000,00
NON URUSAN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media	65.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	227.865.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	199.074.970,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	107.796.490,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.695.200.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	45.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	125.212.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	125.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.302.089.631,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	95.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.491.095.475,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.560.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.125.686,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.821.409,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	86.400.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	59.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
NON URUSAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NON URUSAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.744.062,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
NON URUSAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	122.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	416.687.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal	115.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	145.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.925.243.469,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	827.808.552,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.580.008,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	486.270.818,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	76.208.376,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	44.156.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	207.518.024,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25.530.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	196.450.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	130.766.660,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.266.365,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.423.530,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.127.280,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.156.592,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00
NON URUSAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	905.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	900.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	50.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.390.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	309.325.592,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.848.201.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	195.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	350.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	245.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyediaan Infrastruktur	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Perlindungan Hasil Kreativitas	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.373.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	40.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	75.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.936.100.576,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.834.680,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.262.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.738.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	43.692.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	37.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	50.239.680,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	525.170.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	800.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.544.990,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	645.183.375,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	86.750.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	40.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	43.350.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	165.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	90.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Citra Produk Ekspor	32.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	50.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.922.503.542,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.600.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	10.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.004.065.332,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.732.323.914,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.377.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	313.530.438,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	76.427.200,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	72.409.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.177.128.200,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	211.871.800,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	120.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	95.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	190.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	84.401.400,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	250.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	371.296.990,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	37.776.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	150.943.748,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	149.096.337,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	148.097.890,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	55.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	927.724.200,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.972.015.729,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.200.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.117.500,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.381.400,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.334.200,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.371.037,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.134.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.303.400,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.495.062,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.500.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.820.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.249.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.600.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.770.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.500.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.925.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	300.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.923.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.869.801,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.815.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	581.098.080,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.800.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.386.858.500,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.930.686,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.200.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.800.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.423.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.600.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.288.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.960.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.156.687,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.659.160,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.930.686,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.197.155,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.700.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.400.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.342.085,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	867.616.437,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35.520.871,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	900.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	500.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	270.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	170.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	79.537.025,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	294.020.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	135.331.760,00
NON URUSAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.275.494,00
NON URUSAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000,00
NON URUSAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.190.000.000,00
NON URUSAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.780.000,00
NON URUSAN	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
NON URUSAN	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.628.701,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
NON URUSAN	Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	110.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	700.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	480.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	2.142.380.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	195.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	437.860.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	1.400.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.499.283.701,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.519.860.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	616.288.688,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	250.000.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	44.370.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	9.821.022.301,00
NON URUSAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000,00
NON URUSAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000,00
NON URUSAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000,00
NON URUSAN	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.922.649.594,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	40.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	132.200.950,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	218.679.835,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	242.216.480,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	140.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	200.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	150.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.385.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.238.280,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.535.278.771,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	800.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.782.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	15.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	460.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.658.240,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.583.052,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	4.500.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	125.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	50.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	100.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	50.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	25.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	75.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	50.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	17.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	19.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	24.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	7.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	12.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	198.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	51.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	293.500.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	157.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	356.364.431.070,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.500.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.881.614.736,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	225.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	35.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	550.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	440.995.306,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	885.820.011,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	975.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.781.438.311,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	233.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	100.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.155.500.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	218.900.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	82.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	50.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	35.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	200.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	60.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	611.020.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	7.500.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	36.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.908.652.392,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.800.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.600.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.250.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.400.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.000.000,00
NON URUSAN	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	30.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50.480.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	107.180.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	35.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	37.814.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	73.730.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	20.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	119.500.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	50.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	85.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.276.134.947,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	40.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	inspektorat	inspektorat	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.900.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	98.700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.015.463,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.158.555,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	278.380.970,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.214.378,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.797.478,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	366.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	598.982.800,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	328.044.592,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	346.990.784,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	288.799.545,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	383.055.920,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	424.005.630,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	472.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	575.073.430,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	398.750.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	58.580.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	89.540.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	153.410.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	55.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	95.589.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	68.330.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	103.289.638,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	101.848.765,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	75.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.349.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.300.595,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.950.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.290.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	66.810.810,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.893.880,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	175.779.570,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	57.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.716.220,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	17.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.480.880,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	31.598.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.895.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.060.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.812.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	29.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	95.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.029.073.991,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.070.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.709.900,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.865.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.960.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.498.270,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.205.700,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.268.450,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.940.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.485.800,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.685.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.606.800,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.408.500,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.280.320,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.259.302,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.750.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.994.405,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.900.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.434.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.300.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.540.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.900.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.040.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.264.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.540.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.780.474,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.280.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.346.800,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.440.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.377.889,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.120.005,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.557.040,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.150.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.556.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.660.698,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.600.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.685.360,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.097.760,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.867.360,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.442.160,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.656.810,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.845.200,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jlamprang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Sambek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Rojoimo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Timur	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Bumireso	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kejiwan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Mlipak	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.160.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Pagerkukuh	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kalianget	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Wonosobo Barat	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Jaraksari	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.461.093,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Kramatan	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.900.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.544.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wonosobo	Kelurahan Tawangsari	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.112.240,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	73.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.353.625,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.823.950,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	201.212.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	507.275.775,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	83.232.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	53.855.625,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.444.125,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.180.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	64.127.062,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	140.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	120.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.384.877,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.847.998,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.551.499,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.960.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.999.400,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.805.250,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.150.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.724.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.313.100,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.226.593,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.900.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.760.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.040.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.215.919,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kecamatan Kertek	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Wringinanom	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Kertek	Kelurahan Kertek	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.044.275,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	280.375.296,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	357.984.105,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	62.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	40.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.033.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.967.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	21.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	139.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	30.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.203.693.318,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.020.290,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.760.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.080.240,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.250.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.250.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.874.210,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.630.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	80.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.579.240,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.900.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.179.500,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.530.304,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.303.136,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.800.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.586.176,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Wonorejo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.758.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Selomerto	Kecamatan Selomerto	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	66.360.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.790.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.445.390,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	40.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	372.353.985,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	52.103.625,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.900.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.130.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.420.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.727.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.285.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.878.357.004,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.075.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.917.780,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.119.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.724.700,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.410.300,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.700.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.093.100,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.820.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.070.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.310.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.592.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kecamatan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Leksono	Kelurahan Leksono	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.002.520,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	57.024.375,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	86.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	337.641.525,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	78.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	61.012.500,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.076.549.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.516.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336.899.619,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.900.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.040.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.624.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kelurahan Wonoroto	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.996.270,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	85.411.961,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.217.096,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.863.660,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	415.710.419,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	306.096.005,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	395.399.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	65.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	131.253.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	104.884.363,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52.457.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	32.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	181.932.663,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.143.660,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.739.696,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.608.431.512,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.283.087,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.159.800,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.704.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.560.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.225.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.440.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.720.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.720.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.415.500,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.309.500,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kecamatan Mojotengah	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Kalibeber	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.660.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Mudal	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Mojotengah	Kelurahan Andongsili	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.436.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	69.536.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	397.395.573,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	45.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	51.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	207.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.255.259.365,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.100.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	19.384.101,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.540.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Garung	Kecamatan Garung	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Garung	Kelurahan Garung	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.729.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48.721.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.440.269,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	71.609.902,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	193.476.157,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.050.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.950.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	125.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	27.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.071.410,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.696.400,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	54.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.300.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.760.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.656.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.240.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kelurahan kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
NON URUSAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.098.765.145,00
NON URUSAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.500.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Kejajar	Kecamatan Kejajar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.473.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	55.379.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.690.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	14.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	69.730.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	121.511.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.100.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	417.665.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	17.407.300,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.356.532,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.457.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.215.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.050.300,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93.920.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.840.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	73.159.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.833.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.014.247.046,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	650.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.360.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.910.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.060.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.950.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	1.860.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	736.400,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalikajar	Kecamatan Kalikajar	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Kalikajar	Kelurahan Kalikajar	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.173.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.060.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.585.860,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	484.639.212,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	105.382.250,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	74.091.060,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.816.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.253.040,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	26.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.420.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	93.228.132,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.596.750,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.967.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.325.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.330.741.851,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.760.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.963.200,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.986.900,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.248.300,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.655.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.650.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.054.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.080.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.360.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.980.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.205.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sapuran	Kecamatan Sapuran	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.048.685,00
NON URUSAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.940.340,00
NON URUSAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.143.903,00
NON URUSAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	11.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Sapuran	Kelurahan Sapuran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	62.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.764.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	475.575.030,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	42.948.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.016.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	125.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	26.375.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	30.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.271.219.474,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	800.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.780.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	330.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.190.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	742.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	63.171.513,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.920.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.600.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.971.598,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kepil	Kelurahan Kepil	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.318.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Kepil	Kecamatan Kepil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.927.390,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	316.001.159,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	60.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.880.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.097.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	83.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	47.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.103.455,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.929.106.815,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.600.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.900.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.640.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.273.785,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.360.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.300.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.720.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.590.376,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.730.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kecamatan kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan kaliwiro	Kelurahan Kaliwiro	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	440.389.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.840.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.111.111.867,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.700.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.600.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	6.600.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.779.999,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.487.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.720.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.540.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.144.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.600.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Wadaslintang	Kecamatan Wadaslintang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00
NON URUSAN	Kecamatan Wadaslintang	Kelurahan Wadaslintang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	67.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100.342.649,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.400.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	37.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.217.091.203,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	32.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.518.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.008.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.416.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	121.690.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.951.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130.558.678,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.242.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.330.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	94.468.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.967.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.967.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.804.988.492,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	993.500,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.563.227,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.600,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.690,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.880.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.240.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.520.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.483.259,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Kalibawang	Kecamatan Kalibawang	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.796.160,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	580.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.724.400.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125.000.000,00

NAMA URUSAN	NAMA SKPD	NAMA SUB UNIT	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	RINCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.516.455.120,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.820.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.500.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	50.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00

